



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

***AGENDA SETTING PEMBERITAAN KONFLIK REKLAMASI  
TELUK JAKARTA OLEH MEDIA DARING ANTARA NEWS  
DAN REPUBLIKA ONLINE TAHUN 2017  
(TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL)***

**FAJRIA HASTA RIZKI**

**NIM:120170303010**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**BOGOR**

**Februari 2019**


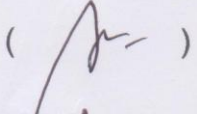


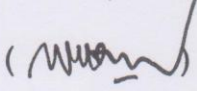
## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Fajria Hasta Rizqi  
NIM : 120170303010  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Judul Tesis : *Agenda Setting* Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta oleh Media Daring *ANTARA News* dan *Republika Online* Tahun 2017 (Tinjauan dari Perspektif Keamanan Nasional)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. (  )  
Pembimbing II : Dr. A. Setyo Wibowo (  )  
Penguji I : Dr. Priza Audermando Purba (  )  
Penguji II : Letkol Ckm. Dr. Achmed Sukendro, M.Si (  )  
Penguji III : Letkol Caj. Dr. I Nyoman Astawa, M.Si, M.Phil (  )  
Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : Februari 2019

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah saya ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, sub-bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019



Fajria Hasta Rizqi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pertahanan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajria Hasta Rizqi  
NIM : 120170303010  
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik  
Fakultas : Keamanan Nasional  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

*“Agenda Setting Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta oleh Media Daring ANTARA News dan Republika Online Tahun 2017 (Tinjauan dari Perspektif Keamanan Nasional)”*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019



Fajria Hasta Rizqi

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkah dan rahmat yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Agenda Setting Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta oleh Media Daring ANTARA News dan Republika Online Tahun 2017 (Tinjauan dari Perspektif Keamanan Nasional)*”.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung atau tidak. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP, M.A.P, selaku Rektor Universitas Pertahanan beserta para Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenyam pendidikan di Universitas Pertahanan.
2. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT, selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada selama masa studi di Universitas Pertahanan.
3. Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan Madjid SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional dan Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat demi kelancaran dalam penyusunan tesis ini.
4. Romo A. Setyo Wibowo, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan dan diskusi yang membangun dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Dosen-dosen di lingkungan Universitas Pertahanan, khususnya Prodi Damai dan Resolusi Konflik yang juga turut memberikan dukungan dan arahan untuk penyusunan tesis ini.

6. Dr. Puspitasari, akademisi dibidang Komunikasi, yang telah memberikan saran dan arahan terhadap analisis konten berita dalam tesis ini.
7. Para Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu yakni Teguh Priyanto (Redaktur Pelaksana *ANTARA News*), Bayu Hermawan (Redaktur Pelaksana Desk Nasional *Republika Online*), Agus Sudibyso (Direktur Riset dan Komunikasi Publik Persatuan Wartawan Indonesia), Syali Gestanon (Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta), Habib Setiawan, S.Sos, M.Si (Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta) dan Heny Agustina (Kasubdit Inventarisasi dan Status Mutu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
8. Seluruh civitas akademika Universitas Pertahanan yang telah membantu dalam urusan administrasi.
9. Orangtua yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
10. Sahabat serta rekan-rekan Cohort 9 Universitas Pertahanan yang turut memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan serta bermanfaat bagi media dan seluruh pihak terkait guna meningkatkan stabilitas keamanan nasional.

Bogor, Februari 2019



Fajria Hasta Rizqi

## ABSTRAK

### ***Agenda Setting* Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta oleh Media Daring *ANTARA News* dan *Republika Online* Tahun 2017 (Tinjauan dari Perspektif Keamanan Nasional)**

**FAJRIA HASTA RIZKI**

Pada tahun 2017, Provinsi DKI Jakarta berada pada tahun politik dengan adanya Pemilu DKI Jakarta yang menyebabkan polemik atas fenomena reklamasi Teluk Jakarta meningkat atau tereskalasi. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran media dalam menggiring opini publik dan juga kebijakan pemerintah terhadap fenomena tersebut. Namun saat ini media tidak terlepas dari statusnya sebagai bagian dari industri. Revolusi Industri 4.0 juga menyebabkan media mulai beralih dari cetak menjadi media daring berupa *website* portal berita yang dapat diakses dengan mudah dan bersifat *real-time*. Pada penelitian ini, *ANTARA News* dan *Republika Online* merupakan media daring yang dipilih sebagai objek dikarenakan kedua media tersebut memiliki sikap yang sekilas terlihat berbeda dalam menyikapi fenomena reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi teks berita pada waktu *traffic* pemberitaan tertinggi di tahun 2017, kemudian dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait serta studi dokumen. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis isi, serta menggunakan triangulasi teknik. Analisis menggunakan 2 (dua) teori utama yakni *Agenda Setting* serta Konsep Sekuritisasi dan didukung beberapa teori tambahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa media daring portal berita yang diteliti memiliki perbedaan *Agenda Setting* yang menyebabkan adanya perbedaan warna berita yang dikeluarkan di tahun 2017. Pemberitaan tersebut berdampak pada keamanan nasional Indonesia yakni pada sektor penggolongan ancaman. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi kedua media daring untuk memperhatikan kaidah keamanan nasional agar pemberitaan yang dikeluarkan mampu mendukung stabilitas keamanan nasional.

**Kata Kunci: Reklamasi Teluk Jakarta, Pemberitaan, Media Daring, Keamanan Nasional**

## **ABSTRACT**

### ***Agenda Setting on The News aboutThe Jakarta Bay Reclamation from Online Media ANTARA News and Republika Online in 2017 (Overview from National Security Perspective)***

**FAJRIA HASTA RIZQI**

*In 2017, DKI Jakarta Province had been on It's political year due to the Governor Election which was escalating the polemics on Jakarta Bay reclamation. Those issues were inseparable from the role of media which lead public opinions and also the government policies about the phenomenon. However, media cannot be separated as the part of industry. Industrial revolution 4.0 makes media changes it's platform from printing to website of news portal which gives easy access to the news and also provides real-time information. ANTARA News and Republika Online were selected as object of the reaserch for their different positions on reporting Jakarta Bay recalamation. This research was conducted by observing the online news at the highest news traffic time in 2017, then by conducting interviews with persons who are related to the issue and also do the document studies. The method used in this reasearch is qualitative with a case study approach and content analysis, as well as using technical triangulation. The analysis uses 2 (two) main theories, Agenda Setting and Concept of Securitization and supported by several additional theories. The results of the research stated that the online media news portal studied had a different Agenda Setting which caused a difference in the nuance of the news issued in 2017. The news had an impact on Indonesia's national security, to classify the different threats to national security. Also this research provides recommendations for both online media to pay attention to the rules so that the news released could support national security stability.*

**Keywords: Jakarta Bay Reclamation, News Report, Online Media, National Security**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR ISTILAH .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian .....	10
1.3 Rumusan Masalah .....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.5.1 Manfaat Akademis .....	11
1.5.2 Manfaat Praktis .....	12
BAB 2 KAJIAN TEORETIK .....	13
2.1 Deskripsi Konseptual .....	13
2.1.1 <i>Agenda Setting</i> .....	13
2.1.2 <i>War and Peace Journalism</i> .....	17
2.1.3 <i>Green Theory</i> .....	20
2.1.4 Konsep Sekuritisasi dalam Keamanan Nasional .....	21

2.1.5 Dialektika.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran .....	29
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.2.1 Tempat Penelitian .....	30
3.2.2 Waktu Penelitian .....	31
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5 Pemeriksa Keabsahan Data .....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	33
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 <i>ANTARA News</i> dan <i>Republika Online</i> dalam Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2017 .....	36
4.1.2 Pandangan serta Upaya Media Daring dan Lembaga mengenai Keamanan Nasional .....	53
4.2 Pembahasan .....	68
4.2.1 Agenda Setting <i>ANTARA News</i> dan <i>Republika Online</i> dalam Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta 2017 .....	68
4.2.2 Perspektif Keamanan Nasional .....	80
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Rekomendasi.....	89
5.2.1 Rekomendasi Teoritis.....	89
5.2.2 Rekomendasi Praktis .....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Variabel dan Indikator Agenda Setting.....	17
Tabel 2.2 Variabel dan Indikator <i>War and Peace Journalism</i> menurut Johan Galtung.....	19
Tabel 2.3 Variabel dan Indikator <i>Ecocentrism</i> dan <i>Anthropocentrism</i> .....	21
Tabel 4.1 Pemetaan Persepsi Ancaman terhadap Keamanan Nasional .	63
Tabel 4.2 Pernyataan Luhut Mendukung Reklamasi .....	66
Tabel 4.3 Pernyataan Anies Baswedan Menolak Reklamasi.....	66
Tabel 4.4 Pernyataan Penengah/Saran dari Jusuf Kalla terhadap Reklamasi Teluk Jakarta.....	67

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Timeline Politik Pemilu pada DKI Jakarta 2017 .....	2
Bagan 1.2 Tahapan Eskalasi Konflik menurut Johan Galtung .....	4
Bagan 2.1 <i>Agenda Setting</i> .....	16
Bagan 2.2 Kerangka Dialektika menurut Hegel .....	25
Bagan 2.3 Kerangka Pemikiran .....	29
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data menurut Miles, Huberman dan Saldana	34
Bagan 3.2 Penentuan <i>Tone</i> Pemberitaan .....	34
Bagan 4.1 Jumlah Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta dari ANTARA News Tahun 2017 .....	42
Bagan 4.2 <i>Tone</i> Pemberitaan ANTARA News 2017 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta .....	44
Bagan 4.3 Persentase war and peace ANTARA News pada Oktober 2017 .....	44
Bagan 4.4 Presentase <i>Green Theory: Ecocentric</i> dan <i>Anthropocentric</i> dalam Pemberitaan ANTARA News pada Oktober 2017 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.....	45
Bagan 4.5 Jumlah Pemberitaan Republika Online tahun 2017 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.....	50
Bagan 4.6 <i>Tone</i> Pemberitaan Republika Online tahun 2017 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.....	51
Bagan 4.7 War and Peace Journalism dalam Republika Online mengenai Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017.....	52
Bagan 4.8 Persentase Pemberitaan Republika Online dalam kerangka <i>ecocentric</i> dan <i>anthropocentric</i> .....	53
Bagan 4.9 Perbandingan War and Peace Journalism antara ANTARA News dan Republika Online dalam Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Oktober 2017 .....	71
Bagan 4.10 Perbandingan <i>Ecocentric</i> dan <i>Anthropocentric</i> .....	73
Bagan 4.11 Perbandingan <i>Tone</i> Pemberitaan .....	75
Bagan 4.12 Dialektika Hegel dalam Pemberitaan Reklamasi .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta .....	2
Gambar 1.2 Demonstrasi penolakan reklamasi tanpa kekerasan oleh masyarakat, utamanya koalisi nelayan dan mahasiswa .....	4
Gambar 1.3 Beberapa Headline dari Antaranews.com di tahun 2017 .....	8
Gambar 1.4 Beberapa Headline Republika.co.id mengenai Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta.....	9
Gambar 4.1 Cuplikan beberapa <i>Headline ANTARA News</i> dan <i>Republika Online</i> Oktober 2017 .....	64

## DAFTAR ISTILAH

### A

- Agenda Setting* : Kompetisi yang berlangsung diantara pemrakarsa isu untuk mendapatkan perhatian dari profesional media, publik serta kelompok elite kebijakan
- Ahok : Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI 2014-2017
- Amdal : Analisis Dampak Lingkungan
- Anies Baswedan : Gubernur DKI Jakarta 2017-2022
- ANTARA News* : Portal berita, diakses melalui *www.antaraneews.com*
- ANTARA : Kantor Berita milik Pemerintah Indonesia
- Anthropocentric* : Analisis manusia, menjelaskan mengenai manusia dan kepentingan hidup manusia.

### C

- Cagub : Calon Gubernur
- Cawagub : Calon Wakil Gubernur

### D

- DKI : Daerah Khusus Ibukota (Jakarta)
- DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

### E

- Ecocentric* : Analisis mengenai lingkungan, menjelaskan aspek-aspek lingkungan dan kepentingan lingkungan.
- Ekologi : Aspek lingkungan
- Elite Oriented (EO)* : Salah satu aspek dalam *war and peace journalism* yang hanya mengusahakan upaya damai di kalangan elite.
- Elite : Golongan atas/tinggi baik dalam pemerintahan maupun ranah bisnis.

**F**

Fenomena :Rangkaian peristiwa/bentuk keadaan yang dapat diamati.

*Framing* : Membingkai/melakukan sorotan terhadap sesuatu.

**H**

*Harian Republika* : Koran fisik/konvensional milik *Republika* .

Hegel : Filsuf yang mempelopori konsep dialektika.

**I**

Isu : Suatu konflik antara dua atau lebih kelompok yang dapat diidentifikasi lebih dari masalah prosedural ataupun substantif terkait pada distribusi posisi ataupun sumber daya.

**J**

Johan Galtung : Pencetus teori-teori dibidang damai dan resolusi konflik, diantaranya *war and peace journalism*.

**K**

Keamanan Nasional:

Kemenkomaritim : Kementerian Koordinator Kemaritiman

Keppres : Keputusan Presiden

Kesbangpol : Kesatuan Bangsa dan Politik

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KNTI : Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Komoditas : Barang produksi yang dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, dapat dipertukarkan, dan dapat diperjualbelikan.

Konflik : *configere*, saling memukul/satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KSTJ : Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

## L

LKBN ANTARA : Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA

Luhut Binsar Panjaitan : Kemenkomaritim

## M

Mahaka Group : Perusahaan swasta yang bergerak di bidang multimedia dan induk perusahaan dari *Republika Online*.

Media Massa : Berisikan jurnalis profesional, bersifat satu informasi untuk banyak pembaca, memiliki struktur organisasi dan *agenda setting*.

Media Sosial : Ruang dimana siapapun bisa menjadi jurnalis, informasi dari banyak orang untuk banyak pembaca, tidak memiliki struktur organisasi dan *agenda setting*.

Menkomaritim : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

## P

Peace/Conflict Oriented (PCO): Berorientasi pada kejelasan informasi konflik dan inisiatif perdamaian.

Pemerintah : Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemilukada : Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemprov : Pemerintah Provinsi

Perspektif : Pandangan/tinjauan

PJ : *Peace Journalism*

Polda Metro Jaya : Kepolisian Daerah Metro Jaya (menaungi wilayah DKI Jakarta)

Polemik : Perdebatan yang menyebabkan adanya perang pena.

Propaganda Oriented (PGO) : Mengulik ketidakbenaran lawan dan menyembunyikan kebenaran.

**R**

*Republika Online* : Portal berita, diakses melalui *www.republika.co.id*

**S**

*Solution Oriented (SO)* : Berorientasi pada solusi/penyelesaian konflik.

**T**

*Timeline* : Garis waktu suatu momen/fenomena.

Timses : Tim Sukses

*Truth Oriented (TRO)* : Berorientasi pada kebenaran.

**V**

*Victory Oriented (VO)* : Berorientasi pada kemenangan.

**W**

Walhi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Wapres : Wakil Presiden

*War/Victory Oriented (WVO)* : Berorientasi memperkeruh konflik.

WJ : *War Journalism*

**Z**

*Zero Sum Game* : Ada yang menang dan lainnya kalah.

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	1-1
Surat Penelitian.....	1-1
LAMPIRAN 2.....	2-1
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	2-1
Pertanyaan Wawancara Media ANTARA News dan Republika Online .....	2-1
Pertanyaan Wawancara Lembaga Pemerintah dan Non Media*)....	2-4
LAMPIRAN 3 .....	3-1
Analisis Berita ANTARA News.....	3-1
Tone Pemberitaan .....	3-1
<i>Green Theory: Ecocentrism dan Anthropocentrism</i> .....	3-5
<i>War and Peace Journalism</i> .....	3-10
LAMPIRAN 4.....	4-1
Analisis Republika Online.....	4-1
Tone Pemberitaan.....	4-1
<i>Green Theory: Ecocentrism dan Anthropocentrism</i> .....	4-31
<i>War and Peace Journalism</i> .....	4-64

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdebatan mengenai reklamasi Teluk Jakarta diawali pada tahun 2015 ketika pengerjaan mega proyek tersebut dimulai. Terdapat banyak kendala salah satunya dikarenakan adanya gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) dan juga penghentian sementara atau disebut juga moratorium dari Kemenkomaritim pada tahun 2016 dibawah kepemimpinan Rizal Ramli dan juga moratorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kementerian terkait lainnya karena dampak yang besar terhadap lingkungan.<sup>1</sup>

Perdebatan yang ada dapat disebut sebagai sebuah polemik. Polemik adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa.<sup>2</sup> Polemik reklamasi yang terjadi semakin meningkat ketika pada tahun 2017 ada sebuah momentum besar bagi DKI Jakarta yakni terselenggaranya Pemilu pada DKI Jakarta tahun 2017<sup>3</sup> serta berbagai macam peristiwa yang mengarah pada penjatuhan hukum pidana pada Gubernur DKI Jakarta petahana pendukung reklamasi saat itu yakni Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok.<sup>4</sup> Hal tersebut mendatangkan sebuah momentum yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang kontestasi pemerintah maupun publik dalam konflik reklamasi Teluk Jakarta. Berikut cuplikan *timeline* politik Pemilu pada DKI Jakarta tahun 2017:

---

<sup>1</sup>Biro Informasi dan Hukum Kemenkomaritim Republik Indonesia, 2016, *Rizal Ramli pastikan Moratorium Reklamasi*, melalui <https://maritim.go.id/rizal-ramli-pastikan-moratorium-proyek-reklamasi/> pada Desember 2018.

<sup>2</sup> Arti polemik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/polemik>

<sup>3</sup> Pemilu dilaksanakan 2 (dua) putaran, yakni pada Februari dan April 2017.

<sup>4</sup> Pemberitaan kasus pidana Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama selaku petahana Gubernur DKI Jakarta di semester awal 2017, diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/20/13592891/ini.alasan.jaksa.hanya.kena.kan.ahok.pasal.156.kuhp> pada Desember 2018.



**Bagan 1.1 Timeline Politik Pemilukada DKI Jakarta 2017**  
(Sumber: Diolah dari agenda besar pemilukada DKI Jakarta)

Berdasarkan sejarahnya, fenomena reklamasi Teluk Jakarta memiliki jalan panjang dimulai pada era Presiden Soeharto melalui Keppres No. 52 Tahun 1995 yang memaksakan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta dengan tujuan mengatasi keterbatasan lahan bagi penduduk DKI Jakarta yang terus meningkat setiap tahunnya serta peningkatan ekonomi dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan ekonomi yang memiliki nilai strategis.<sup>5</sup> Kendala dan polemik terus terjadi terkait reklamasi, hingga pada akhirnya muncul Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030 yang menyatakan akan ada 14 pulau reklamasi, namun karena ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 maka jumlah pulau reklamasi ditambah menjadi 17 pulau dari Pulau A hingga Pulau Q.



**Gambar1.1 Peta Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta**  
Sumber: Pergub DKI Jakarta 246/2014 dan Pergub DKI Jakarta 121/2012

<sup>5</sup>Sri Nurhayati Qodriyatun, 2017, Majalah Info Singkat: *Reklamasi Teluk Jakarta, Perlukah Dilanjutkan?*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 10, diakses melalui [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-20-II-P3DI-Oktober-2017-189.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-20-II-P3DI-Oktober-2017-189.pdf) pada 21 Juni 2018

Pada tahun 2017, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mencabut moratorium tersebut<sup>6</sup> dikarenakan perspektif bahwa pulau buatan akan mampu menahan air laut agar tidak pasang ke daratan.<sup>7</sup> Pada sisi lain, polemik terjadi antara pihak yang pro dengan reklamasi, maupun yang kontra. Bagi pandangan mereka yang pro reklamasi, pembuatan pulau-pulau baru ini akan mampu memberikan ruang gerak bagi penduduk ibukota yang sudah sangat terbatas dalam ketersediaan lahan dan mampu menciptakan pulau-pulau sebagai kawasan strategis yang mampu memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi melalui adanya pembinaan kawasan oleh pihak swasta. Sementara mereka yang kontra dengan reklamasi menganggap bahwa hal tersebut bukanlah proyek yang sepele bagi lingkungan dan juga ekosistem di pesisir pantai, bahkan reklamasi dapat menyebabkan krisis ekologi yang harus ditanggung masyarakat, pemerintah, maupun alam dan segala biotanya yang kehilangan keseimbangan dikarenakan adanya perubahan kecil yang semakin berdampak besar.

Polemik reklamasi yang terjadi selama tahun 2017 tidak lagi hanya sebuah perbedaan dalam pemikiran di masyarakat. Polemik telah memiliki bentuk-bentuk manifestasi atas perbedaan pandangan yang terjadi seperti adanya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak secara langsung, seperti nelayan dan koalisi-koalisinya ataupun yang tidak terdampak langsung seperti mahasiswa. Demonstrasi seperti yang dapat dilihat dalam cuplikan gambar berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 10

<sup>7</sup> Dani Prabowo, 2017, *Ahli Kelautan: Reklamasi Bukan Solusi Banjir Jakarta*, diakses melalui <https://properti.kompas.com/read/2017/11/02/162605421/ahli-kelautan-reklamasi-bukan-solusi-banjir-jakarta> pada 21 Juni 2018

<sup>8</sup>Gambar diakses melalui berbagai web: Gambar 1 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170726122444-20-230397/nelayan-demo-tolak-dua-raperda-reklamasi-teluk-jakarta>, Gambar 2 melalui <http://globalindo.co/aliansi-nelayan-demo-tolak-reklamasi/>, Gambar 3 melalui <https://tirto.id/penolak-reklamasi-sertifikat-hpl-pulau-c-dan-d-cacat-hukum-cvCx>, Gambar 4 melalui <https://unjkitas.com/tolak-reklamasi-mahasiswa-sambang-balai-kota-dki-jakarta/>



Gambar 1.2 Demonstrasi penolakan reklamasi tanpa kekerasan oleh masyarakat, utamanya koalisi nelayan dan mahasiswa (Sumber: Diolah dari berbagai sumber berupa portal berita)

Berbagai peristiwa demonstrasi tersebut apabila dijelaskan melalui tahapan eskalasi konflik menurut Johan Galtung berada pada fase *contradiction* atau kontradiksi.<sup>9</sup> yang mana terdapat manifestasi (tindakan yang terlihat)<sup>10</sup> dari perbedaan pendapat/polemik yang ada. Manifestasi atau adanya sebuah tindakan tanpa kekerasan merupakan faktor tereskalasinya suatu konflik dari fase perbedaan (*difference*) ke tahap selanjutnya yakni kontradiksi (*contradiction*) yang termanifestasi berupa aksi tanpa kekerasan (dalam kasus ini adalah demonstrasi pada Gambar 1.2). Berikut bagan tahapan konflik oleh Johan Galtung:



### Bagan 1.2 Tahapan Eskalasi Konflik menurut Johan Galtung (Sumber: Ramsbotham, dkk, 2015)

<sup>9</sup> Menurut tahapan eskalasi konflik Johan Galtung melalui Oliver Ramsbotham, dkk, 2015, *Contemporary Conflict Resolution*, New Jersey: Wiley Publishing

<sup>10</sup> Andrea Bartoli, dkk, 2011, *Mental Models in the Visualization of Conflict Escalation and Entrapment: Biases and Alternatives* (24th Annual International Association of Conflict Management Conference, Istanbul: Turkey).

Reklamasi Teluk Jakarta menurut bagan tahapan eskalasi tergolong pada tahap kontradiksi yang jika tidak direduksi maka akan meningkat/bereskalasi menjadi konflik yang dampaknya cukup besar yakni polarisasi. Fenomena reklamasi Teluk Jakarta memang sangat pelik. Berbagai pihak memiliki kepentingannya masing-masing dalam konflik tersebut. Salah satu diantaranya adalah media, yakni sebagai pihak yang berpengaruh dalam penggiringan opini publik atas konflik tersebut.

Seiring perkembangan zaman yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang berporos pada era digital, manusia lebih berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan, begitupula dengan media yang mulai beralih ranah daring atau *internet base* dibandingkan media cetak. “*The Internet is really two major systems, which need to be distinguished. The first part is Worldwide Web which is the collection of all websites and provides information to its users... (and the second is in chat room)*”.<sup>11</sup> Berdasarkan argumen Marc Sageman tersebut, ada 2 (dua) kategori yakni *website* dan *chat room*. Sementara menurut Jan –Felix Schrape, *website* informasi bagi media digolongkan menjadi 3 (tiga) yakni *micro media* berupa *chat room* dan komunikasi dua arah lainnya, *meso media* yakni sosial media berplatform *website* seperti *microblogging*, *facebook*, dan lainnya, serta *mass media* seperti *website* portal berita.<sup>12</sup>

Media massa merupakan media yang bersifat *one-to-many* yakni terdapat satu organisasi yang berisi jurnalis profesional yang memberikan informasi melalui pemberitaan, sementara media sosial bersifat *many-to-many* yakni dari siapa saja dapat memberikan informasi kepada khalayak luas.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai media massa berupa portal berita

---

<sup>11</sup> Marc Sageman, 2008, *Leaderless Jihad*, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, hlm. 113

<sup>12</sup> Jan-Felix Schrape, 2016, *Social Media, Mass Media and the ‘Public Sphere’: Differentiation, Complementarity and Co-existence*, Stuttgart: University of Stuttgart, hlm. 10

<sup>13</sup>Ibid.

yang mana dapat dengan mudah diakses masyarakat dan memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan pemberitaan.

Beberapa surat kabar di Indonesia mulai bangkrut dan beberapa lainnya belajar untuk memindahkan informasi ke *website*, seperti halnya yang dilakukan *Kompas*, *Republika*, *The Jakarta Post* dan koran ternama lainnya di Indonesia. Perubahan menuju era digital dengan membuat web portal berita membuat informasi berita dapat dengan mudah diakses oleh warganet dan lebih *real time* dalam pemberitaan dikarenakan dalam satu hari web portal berita dapat menaikkan beberapa berita sekaligus baik dalam satu isu ataupun beragam isu.

Media dalam melakukan pemberitaan memiliki agenda tertentu. Agenda adalah maksud dan tujuan atas proses suatu berita diproduksi. Media di Indonesia merupakan sebuah industri atau perusahaan baik milik swasta ataupun yang terdaftar pada BUMN. Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui pemahaman komoditas, yakni ada produsen yang memproduksi informasi dan juga konsumen yang menerima informasi. Komoditas yang dimaksud merupakan informasi yang ingin disampaikan oleh produsen ke konsumen. Informasi sudah diberi label sebagai komoditas dikarenakan adanya keinginan dari produsen untuk menjadikan informasi sebagai sesuatu yang menguntungkan dan dapat diperjualbelikan (seperti komoditas) karena pada dasarnya media adalah sebuah industri/perusahaan yang juga berorientasi pada profit.

Beranjak dari pemanfaatan media sebagai komoditas, media dalam memberitakan konflik reklamasi Teluk Jakarta juga berbeda-beda jurnalismenya yakni ada media yang pro dan juga kontra terhadap reklamasi yang dapat dilihat melalui *headline* judul dan juga kontennya. Dalam penelitian ini *Antarnews.com* (selanjutnya disebut *ANTARA News*) dan juga *Republika.co.id* (selanjutnya disebut *Republika Online*) diambil sebagai objek penelitian dalam pemberitaannya mengenai konflik reklamasi

Teluk Jakarta pada tahun 2017 yang merupakan tahun politik bagi Provinsi DKI Jakarta.

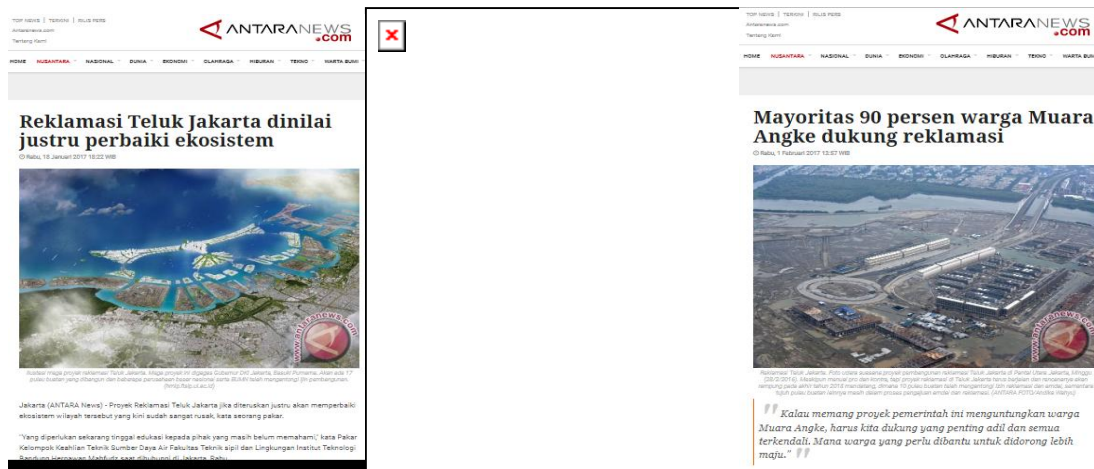
*ANTARA News* merupakan *website* yang diluncurkan Kantor Berita Antara yang merupakan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) yang disahkan melalui Keppres No. 37 Tahun 1962. Kemudian pada tahun 1966, LKBN Antara bukan perusahaan yang dibentuk untuk mencari laba yang diatur dalam Keppres RI No. 85 Tahun 1966.<sup>14</sup> Kemudian pada Januari 1966, Kantor Berita Antara meluncurkan *website* atau portal berita antara yang dapat diakses melalui [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) yang ditujukan untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi secara seketika yang akurat, lengkap dan bermanfaat.<sup>15</sup> Namun saat ini, *ANTARA News* merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada dasarnya adalah sebuah perusahaan yang memiliki orientasi profit, walau *website ANTARA News* tetap memiliki *stakeholder* resminya yakni Pemerintah Republik Indonesia.

Pemberitaan dari *ANTARA News* dapat diakses melalui situs [Antaraneews.com](http://Antaraneews.com) yang mana seluruh lapisan masyarakat juga mampu menggunakan fitur pencarian serta dapat menentukan periode pencarian artikel berita tertentu dengan mudah. Berdasarkan pencarian awal, pada tahun 2017, portal berita *ANTARA News* secara sekilas dapat terlihat memberitakan hal-hal yang terlihat positif mengenai konflik reklamasi Teluk Jakarta yang dapat dibuktikan melalui beberapa *headline* berikut:

---

<sup>14</sup> Dalam profil BUMN Indonesia Edisi 2017. Diakses melalui [http://bumn.go.id/upload/download\\_img/file\\_download/5a604e0322b3a\\_20180118023427/15/#zoom=z](http://bumn.go.id/upload/download_img/file_download/5a604e0322b3a_20180118023427/15/#zoom=z) pada 26 Juni 2018, hlm. 11

<sup>15</sup> Ibid.



**Gambar 1.3 Beberapa Headline dari Antaranews.com di tahun 2017**  
**Sumber: Antaranews.com**

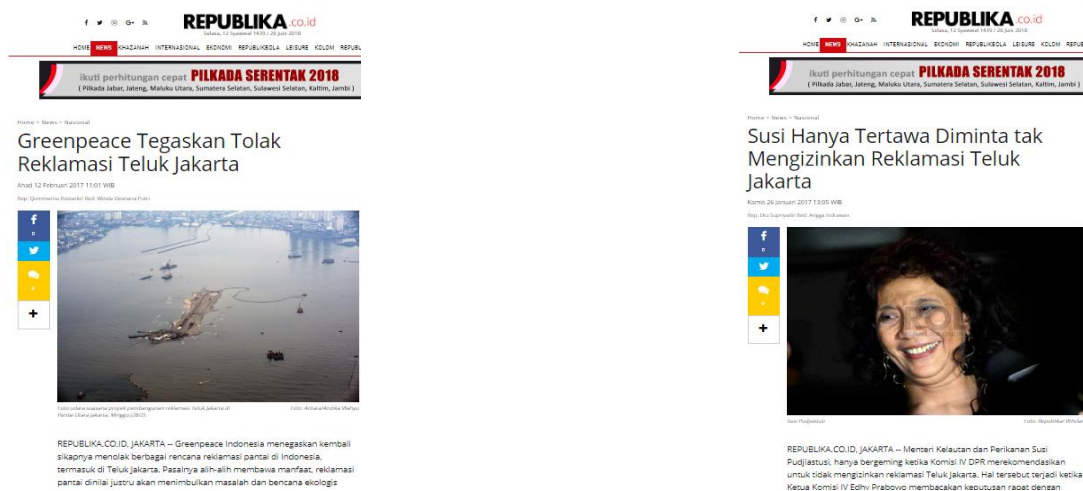
Pada sisi lain, yakni *Republika.co.id* yang merupakan anak perusahaan dari Mahaka Group merupakan media daring milik swasta yang pada dasarnya merupakan bentuk *website* dari *Harian Republika* (surat kabar) yang pada awalnya adalah media bagi komunitas umat muslim. *Republika Online* didirikan pada 17 Agustus 1995 setelah 2 (dua) tahun *Harian Republika* diterbitkan.<sup>16</sup> Apabila ditarik pada sejarahnya, *Republika Online* dan *Harian Republika* diakuisisi oleh Mahaka Group pada tahun 2002 dikarenakan berada diambang kebangkrutan. Mahaka Group merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang informasi dan *entertainment*. Beberapa bidang usahanya selain Koran *Republika* dan *Republika.co.id*, Mahaka Group bergerak dibidang stasiun radio seperti Gen FM, Prambors FM dan Jak FM dan beberapa stasiun radio di daerah lain serta di bidang televisi Mahaka Group memiliki Jak TV dan Alif TV.<sup>17</sup> Mayoritas media yang dimiliki Mahaka Group berbasis di Jakarta.

Pencarian artikel berita pada *Republika Online* sama seperti yang dilakukan pada *Antaranews.com* sebelumnya, walau sedikit agak rumit dikarenakan banyaknya berita mengenai reklamasi Teluk Jakarta dan

<sup>16</sup> Profil Republika Online, diakses melalui <https://www.republika.co.id/page/about>

<sup>17</sup> Lim, Merlyna, 2012, *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*, Arizona: Participatory Media Lab (Univesrity of Arizona), hlm. 13

tidak terfilter dengan baik dari segi waktu pemberitaan dan juga fokus fenomena. Uniknya, pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan *Republika.co.id* terlihat berbeda dengan *Antaraneews.com*, yakni *Republika.co.id* lebih cenderung untuk memberitakan mengenai pihak yang kontra terhadap reklamasi. Berikut beberapa *headline* dari *Republika.co.id*:



**Gambar 1.4 Beberapa Headline Republika.co.id mengenai Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta**  
Sumber: Republika.co.id

Sekilas berdasarkan pencarian pada *Republika.co.id* terlihat beberapa berita yang cenderung kontra reklamasi. Maka dari itu penelitian ini ingin melihat mengenai *Agenda Setting* dari media daring *ANTARA News* dan *Republika Online* mengenai isu yang fenomenal di tahun politik DKI Jakarta yakni 2017.

Menurut Johan Galtung, dalam melakukan pemberitaan akan suatu fenomena seharusnya bersifat netral dan mempromosikan *peace journalism*. Serta bekerja seperti jurnalisme kesehatan yakni melakukan pemberitaan berdasarkan analogi medis, yakni melalui diagnosis, prognosis dan terapi.<sup>18</sup> Bukan sebaliknya seperti jurnalisme olahraga yang menyebabkan adanya informasi siapa yang menang dan siapa yang kalah

<sup>18</sup> Webel, C., & Galtung, J. 2007. Handbook of Peace and Conflict Studies. New York: Routledge.

atau *zero sum game*.<sup>19</sup>Media juga merupakan unsur yang dapat mempengaruhi opini publik dan hal tersebut erat kaitannya dengan keamanan nasional. Berdasarkan fenomena polemik reklamasi media mampu menggiring opini mengenai isu tersebut hingga memunculkan polemik yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Maka dari itu, dalam penelitian ini, *Antaraneews.com* dan *Republika.co.id* akan dianalisis mengenai pemberitaannya melalui proses *agenda setting* dan juga rekomendasi bagi media tersebut untuk pemberitaan kedepannya agar sesuai dengan kaidah media yang baik berdasarkan perspektif keamanan nasional.

## 1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah *agenda setting* yang dilakukan media *online* ANTARA News dan *Republika Online* dalam pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta di tahun 2017, serta meninjau fenomena yang terjadi melalui perspektif keamanan nasional. Sementara subfokus penelitian yakni:

1. Proses *agenda setting* media daring tersebut melalui *Editorial policy* yang menghasilkan proses editorial dari media, untuk menentukan berita yang dimuat pada *ANTARA News* dan *Republika Online* mengenai reklamasi Teluk Jakarta di tahun 2017.
2. Perspektif keamanan nasional melihat *Agenda Setting* ANTARA News dan *Republika Online* melalui pemberitaan dari kedua media daring tersebut.
3. Rekomendasi bagi media daring mengenai pemberitaan konflik yang tepat berdasarkan pandangan damai dan resolusi konflik dan sesuai dengan perspektif keamanan nasional.

---

<sup>19</sup> Nicole Yang Lai Fong, 2009, *Framing Analysis of a Conflict: War/Peace Journalism*, The Journal of the South East Asia Research Centre for Communications and Humanities, Vol.1 No. 1, hlm. 19

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini terletak pada *agenda setting* yang dibuktikan melalui pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta dari media daring *AntaraneWS* dan *Republika*. Penelitian ini menganalisis *agenda setting* dan mengkajinya melalui perspektif keamanan nasional dari kedua media *online* tersebut dengan merumuskan 2 (dua) pertanyaan penelitian, yakni:

- 1) Bagaimana *agenda setting* media daring *ANTARA News* dan *Republika Online* dalam memberitakan konflik reklamasi Teluk Jakarta di Tahun 2017?
- 2) Bagaimana *Agenda Setting* dalam pemberitaan kedua media daring tersebut dilihat dalam perspektif keamanan nasional?

### 1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis proses *Agenda Setting* media daring *ANTARA News* dan *Republika Online* melalui *editorial policy*, pembentukan *public agenda* dan juga *policy agenda*.
- 2) Untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada media dalam memberitakan konflik agar sesuai dengan perspektif keamanan nasional.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat akademis dan praktis. Manfaat akademis lebih dikhususkan pada kebermanfaatan penelitian bagi peneliti, institusi pendidikan serta penelitian selanjutnya, sedangkan manfaat praktis merupakan manfaat langsung adanya penelitian ini yang dapat diperoleh objek-objek maupun pembaca.

#### 1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bentuk penerapan teori-teori dan konsep-konsep yang telah

dipelajari dalam proses belajar pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian mengenai *agenda setting* media daring berskala nasional yang dikaji melalui perspektif damai dan resolusi konflik dalam bingkai keamanan nasional.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi terhadap media daring untuk memberitakan sesuai kaidah jurnalisme damai dan juga pandangan keamanan nasional untuk dimasukkan dalam *agenda setting* mediadaring ketika memberitakan suatu konflik di tahun politik.

## BAB 2 KAJIAN TEORETIK

### 2.1 Deskripsi Konseptual

Penelitian ini menggunakan 2 *Ground Theory* yang pertama yakni *Agenda Setting* menurut James Dearing dan Everett Rogers (1996) dan Konsep Sekuritisasi yang dicetuskan Barry Buzan dan Ole Waever (1995). Teori dan konsep tersebut dalam penggunaannya juga dibantu oleh 3 (tiga) teori yaitu *Agenda Setting* didukung oleh *War and Peace Journalism* (Johan Galtung) serta *Green Theory* (Eckersley), sementara Konsep Sekuritisasi diperkuat oleh Dialektika (Hegel).

#### 2.1.1 *Agenda Setting*

*Agenda Setting* digunakan sebagai salah satu *grand concept* dalam penelitian ini. Pengertian dari *agenda setting* adalah kompetisi yang berlangsung diantara pemrakarsa isu untuk mendapatkan perhatian dari profesional media, publik serta kelompok elite kebijakan.<sup>20</sup> *Agenda Setting* menjelaskan bahwa media melakukan *framing* atau fokus terhadap suatu isu yang dipilih dan bukan isu lainnya untuk membentuk opini publik melalui isu yang diangkat. Hal ini sebenarnya dijelaskan sebelumnya oleh Walter Lippmann bahwa ada sebuah gambar dalam pemikiran manusia yang memang ingin dibentuk atas hal-hal yang tidak mampu untuk mereka ketahui atau mereka jangkau, dan apabila gambar-gambar tersebut ditindaklanjuti oleh kelompok atau individu atas nama kelompok maka hal tersebut dinamakan Opini Publik.<sup>21</sup>

Disisi lain, Maxwell McCombs dan Donald Shaw mengatakan bahwa media mampu memberikan atensi tertentu atas suatu isu sehingga terbentuk adanya suatu isu penting yang media agendakan bahwa isu

---

<sup>20</sup> James W. Dearing dan Everett M. Rogers, 1996, *Communication Concepts 6: Agenda-Setting*, California: Sage Publications, Inc, hlm. 1-2

<sup>21</sup> Walter Lippmann, 1998, *Public Opinion* (Cetakan Kedua), New Jersey: The Macmillan Company, hlm. 29

tersebut penting.<sup>22</sup> Hal tersebut membuat McCombs berpikir bahwa media mampu mempengaruhi apa yang pembacanya pikirkan dengan diperkuat bahwa McCombs dan Shaw mengutip Bernard Cohen seorang jurnalis dan akademisi, yakni:

*“The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it’s stunningly successful in telling its readers what to think about”<sup>23</sup>*

Gerald Kosicki memperkuat pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa media merupakan *gatekeeper* atau penjaga gerbang yakni media tidak hanya mengawasi informasi melainkan media secara aktif mengkonstruksi pesan dengan menekankan aspek-aspek tertentu seperti dalam kutipan Kosicki berikut:

*“Media “gatekeepers” do not merely keep watch over information, shuffling it here and there. Instead, they engage in active construction of the messages, emphasizing certain aspects of an issue and not others.”<sup>24</sup>*

Sehingga menurut McCombs media tidak hanya mempengaruhi gambaran dalam pikiran seperti apa yang dikatakan Lippmann, namun juga media dimungkinkan untuk mempengaruhi tindakan dengan melalui pemilihan informasi atau berita.<sup>25</sup> Hal tersebut menyebabkan teori *Agenda Setting* dari media relevan untuk digunakan dalam media massa konvensional maupun media massa era baru (digital).

Lippmann juga mengatakan bahwa media merupakan sebuah organisasi yang komersil yakni berita yang dikeluarkan oleh media merupakan berita yang dibuat dan diedit untuk ditujukan kepada publik yang membeli pemberitaan dan apabila media mengalienasi diri dari apa yang diinginkan pembacanya maka media tersebut akan akan kehilangan

---

<sup>22</sup> Ibid, Lippmann, hlm. 378

<sup>23</sup> EM Griffin, 2012, *A First Look at Communication Theory*, New York: McGraw-Hill, hlm. 379

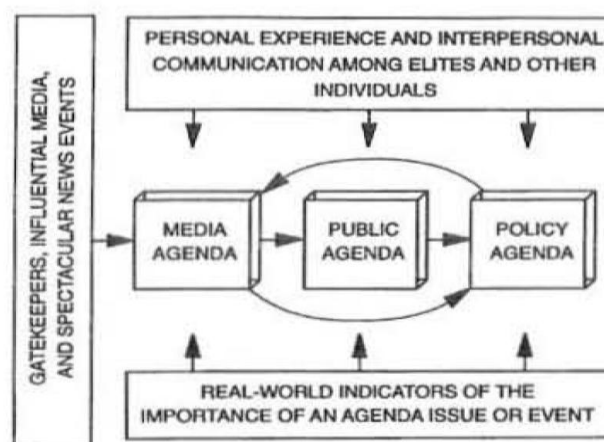
<sup>24</sup> Ibid, hlm. 388

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 388

aset diperlukan agar media tetap mempertahankan eksistensinya.<sup>26</sup> Sehingga pemilihan suatu isu yang akan diberitakan merupakan *agenda* dari media massa yang sebenarnya terikat dengan Opini Publik yang ada.

Sementara itu, isu menurut Cobb dan Elder, diartikan sebagai suatu konflik antara dua atau lebih kelompok yang dapat diidentifikasi lebih dari masalah prosedural ataupun substantif terkait pada distribusi posisi ataupun sumber daya.<sup>27</sup> Penentuan isu yang akan diangkat oleh media sangat mempengaruhi dalam pembentukan gambaran dalam pemikiran manusia. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai konflik reklamasi Teluk Jakarta.

Pada penelitian ini, digunakan teori *Agenda Setting* dari James Dearing dan Everett Rogers yang terdiri atas 3 (tiga) elemen utama dalam melihat *Agenda Setting* media yakni *Media Agenda*, *Public Agenda* serta *Policy Agenda*. *Media agenda* merupakan agenda tertentu dari media yang dilakukan dengan melalui suatu isu. *Public agenda* merupakan agenda publik yakni diskursus ataupun opini masyarakat mengenai suatu isu yang diberitakan media. Sedangkan *policy agenda* merupakan kebijakan yang diambil pemerintah atas suatu isu yang diberitakan tersebut. Proses *agenda setting* dapat dilihat melalui Bagan 2.1.



<sup>26</sup> Op Cit, Lippmann, hlm. 324

<sup>27</sup> Op Cit, Dearing dan Rogers, hlm. 2

**Bagan 2.1 Agenda Setting**  
**Sumber: Dearing & Rogers (1996)**

*Media agenda* dalam penelitian ini dilihat melalui *editorial policy* atau kebijakan editorial dari *ANTARA News* dan *Republika Online* di tahun 2017 dalam memberitakan mengenai konflik reklamasi Teluk Jakarta. Proses *editorial policy* diawali dari *editorial meeting* hingga *desk editor* atau sampai berita berada di tahap akhir sebelum dipublikasikan. *Editorial Policy* menentukan muatan serta publikasi berita yakni media online memiliki agenda tertentu yang polanya berbeda-beda. Selain itu, untuk membuktikan serta melakukan validasi atas *editorial policy* yang dijabarkan dari masing-masing media maka dilakukan analisis terhadap isi pemberitaan melalui *tone* pemberitaan untuk membuktikan data *editorial policy* yang didapat dengan berita yang ada. Penentuan *tone* pemberitaan yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu mengenai *tone* berita dari penelitian oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia. Selain itu, juga digunakan teori *war and peace journalism* serta *green theory* untuk mengetahui apakah *media agenda* dari kedua media daring portal berita tersebut telah membentuk gambaran yang tepat bagi pembacanya melalui kaidah pendekatan damai dan resolusi konflik dan juga ekologi.

Kemudian mengenai *public agenda* difokuskan terhadap perhitungan melalui *tone* pemberitaan mengenai konflik reklamasi Teluk Jakarta, untuk melihat gambaran apa yang ingin diciptakan media dalam ruang publik untuk menjadi diskursus massa ketika mengangkat pemberitaan tersebut di tahun 2017. Aspek terakhir yakni *policyagenda* dilihat melalui perilaku pemerintah yang tercermin melalui kebijakan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi isu yang digambarkan oleh media tersebut. Kebijakan ini dapat dilihat sebelum dan ketika tahun 2017 serta cuplikan kebijakan pada masa setelahnya mengenai konflik reklamasi Teluk Jakarta.

Konsep *Agenda Setting* secara sederhana dapat dilihat melalui tabel berikut:

Variabel	Indikator
<i>Media Agenda</i>	- Pemberitaan (Analisis pada konten dan pembuatan berita)
<i>Public Agenda</i>	- Diskursus massa (opini atau pembicaraan di ruang publik)
<i>Policy Agenda</i>	- Kebijakan (Regulasi ataupun peraturan lain yang dikeluarkan <i>elite</i> pemerintah dalam rangka menanggapi isu yang diberitakan)

Tabel 2.1 Variabel dan Indikator *Agenda Setting*  
(Sumber: Diolah dan diterjemahkan dari Dearing & Rogers (1996))

### 2.1.2 *War and Peace Journalism*

*War and Peace Journalism* atau jurnalisme damai merupakan teori yang dicetuskan Johan Galtung.<sup>28</sup> *War Journalism* disebut juga sebagai media jurnalisme olahraga yang memberitakan mengenai menang dan kalah dalam suatu fenomena konflik. Sementara *peace journalism* diibaratkan sebagai jurnalisme kesehatan yang memberikan informasi kesehatan seperti adanya diagnosis, prognosis dan terapi pada penyakit.

Teori *war and peace journalism* dalam penelitian ini digunakan untuk membantu menganalisis *editorial policy* media melalui pemberitaan yang dikeluarkan mengenai konflik reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nicole Yang Lai Fong (terdapat pada subbab Penelitian Terdahulu) menggunakan teori ini untuk menentukan sebuah pemberitaan bersifat *war* atau *peace journalism* dengan menghitung jumlah berita yang mengandung indikator dari *war and peace journalism*. Berikut merupakan tabel yang dicetuskan oleh Johan Galtung mengenai indikator *War and Peace Journalism*<sup>29</sup>.

<sup>28</sup>Webel, Charles dan Galtung, Johan, 2007, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, New York: Routledge, hlm. 248

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 251

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
<i>Peace/Conflict Oriented</i>	Menjelaskan informasi konflik, seperti pihak-pihak, kepentingan dan juga isu
	Berorientasi pada 'win win' secara umum
	Terbuka secara ruang dan waktu untuk mengetahui akar penyebab dan hasil/kejadian dalam konflik serta melihat aspek sejarah atau budaya
	Transparansi konflik
	Menyuarakan semua pihak, membangun empati dan kesalingpercayaan
	Melihat konflik sebagai masalah, sehingga berfokus pada kreativitas konflik
	Humanisasi seluruh pihak, tidak melakukan marginalisasi
	Proaktif dalam mencegah adanya kekerasan
	Fokus pada efek yang terlihat (korban terbunuh, korban terluka, dan bahaya material lainnya)
	<i>War/Violence Oriented</i>
Berorientasi pada 'zero-sum' (ada yang menang dan ada yang kalah)	
Tertutup secara ruang dan waktu untuk mencari penyebab atau akar masalah	
Membuat peperangan/konflik yang terjadi menjadi suatu rahasia	
Jurnalisme 'Kita vs Mereka', melakukan propaganda dan menyuarakan hanya dari pihak 'kita'	
Melihat 'Mereka' sebagai masalah	
Dehumanisasi 'mereka', ada pihak yang dimarginalkan ataupun disudutkan	
Fokus pada efek tidak nyata seperti trauma, kemenangan, bahaya pada struktur atau kultur	
<i>Truth Oriented</i>	Mengulik ketidakbenaran di seluruh pihak dan membuka apa yang ditutupi
<i>Propaganda Oriented</i>	Mengulik ketidakbenaran 'mereka' dan membantu menutupi kebohongan
<i>People Oriented</i>	Fokus pada korban dari seluruh pihak, wanita, orang tua, anak-anak, serta memberikan suara pada pihak yang lemah ( <i>voiceless</i> )
	Memberikan nama kepada seluruh provokator ( <i>evil doers</i> )
	Fokus pada pembentukan perdamaian pihak-pihak
<i>Elite Oriented</i>	Fokus pada penderitaan kami
	Memberikan nama kepada pelaku kejahatan dari golongan 'Mereka'

	Fokus pada perdamaian kalangan elite
<i>Solution Oriented</i>	Damai=Tanpa kekerasan + kreativitas
	Menekankan pada inisiatif damai dan juga untuk mencegah konflik
	Fokus pada struktur, budaya dan masyarakat yang damai
	Akibat: Resolusi, rekonstruksi dan rekonsiliasi
<i>Victory Oriented</i>	Damai=Kemenangan + Gencatan senjata
	Menyembunyikan inisiasi damai sebelum kemenangan
	Fokus pada perjanjian, institusi dan masyarakat yang terkontrol
	Meninggalkan isu dan akan kembali jika ada pemicu atau menyala lagi

**Tabel 2.2 Variabel dan Indikator *War and Peace Journalism* menurut Johan Galtung (Sumber: Diterjemahkan dari Webel dan Galtung, 2007)**

Teori ini membantu konsep awal yakni *agenda setting* untuk mengetahui kecenderungan media dalam melakukan pemberitaan, yakni dianalisis menggunakan indikator tersebut dengan mengkalkulasikan berapa kali berita yang sesuai dengan indikator muncul. Jika berita telah dikalkulasikan maka akan terlihat bagaimana kecenderungan media tersebut dalam memberitakan reklamasi Teluk Jakarta dan terlihat sesuai atau tidaknya pemberitaan yang dinaikkan dengan *editorial policy* yang dipaparkan media.

Selain itu, *war and peace journalism* dalam penelitian ini juga berfungsi membantu memberikan rekomendasi bagi media untuk memberitakan konflik sesuai dengan kaidah *peace journalism*. Ketika media tersebut cenderung ke arah *war journalism* maka media tersebut tidak sesuai dengan perspektif Galtung mengenai pemberitaan media dan sebaliknya jika terindikasi cenderung ke arah *peace journalism* maka media tersebut sesuai dengan media menurut Galtung. Teori ini juga membantu peneliti mengarahkan penelitian untuk ditinjau melalui perspektif keamanan nasional yakni mengkaitkan hasil kalkulasi pemberitaan dengan konsep keamanan nasional yang digunakan dalam penelitian ini.

### 2.1.3 Green Theory

*Green Theory* didasari oleh *ecocentrism* yakni sebuah pemahaman yang menjadikan lingkungan yang sehat sebagai fokus utama, sehingga mengabaikan aspek *anthropocentrism*<sup>30</sup> yang berfokus pada manusia dan segala kebutuhannya. *Ecocentrism* dan *Anthropocentrism* merupakan pendekatan yang menjelaskan adanya dilema lingkungan.<sup>31</sup> *Anthropocentrism* berfokus bahwa manusia adalah bentuk kehidupan yang paling penting, sehingga bentuk kehidupan lain dipandang hanya untuk menunjang kelangsungan hidup manusia, namun pendekatan ini juga masih menilai bahwa degradasi alam perlu diperhatikan karena mampu membahayakan manusia, sementara *ecocentrism* menyatakan bahwa setiap bentuk kehidupan memiliki nilai intrinsik yang harus dijunjung disamping kebutuhan manusia.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan *Green Theory* dari Robyn Eckersley. Eckersley mengatakan bahwa *anthropocentric* memiliki perhatian terhadap penyebab-penyebab sosial serta distribusi sumberdaya antara kelompok kaya dan miskin (perspektif ekonomi), sementara *ecocentric* melihat kelestarian lingkungan sebagai sesuatu yang vital yang sangat berguna untuk kehidupan manusia (perspektif ekologi)<sup>33</sup>

Berikut merupakan tabel penjabaran variabel dan indikator menurut Eckersley:

Variabel	Indikator
<i>Ecocentrism</i>	Mengenali secara penuh kepentingan manusia pada dunia

<sup>30</sup>Hugh Dyer, 2018, *Introducing Green Theory in International Relations*, Diakses melalui <http://www.e-ir.info/2018/01/07/green-theory-in-international-relations/> pada 28 Juni 2018

<sup>31</sup> Katherine V. Kortenkamp dan Colleen F. Moore, 2001, *Journal of Environmental Psychology: Ecocentrism and Anthropocentrism: Moral Reasoning about Ecological Commons Dilemmas*, Madison: University of Wisconsin, hlm. 1

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>33</sup> Robyn Eckersley, 1992, *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*, New York: UCL Press, hlm. 29

	<i>non-manusia.</i>
	Mengenali kepentingan selain kepentingan manusia.
	Mengenali kepentingan dari masa depan manusia dan selain manusia ( <i>non-manusia</i> )
	Mengadopsi keutuhan dalam membangun perspektif, dibanding keterpecahan.
<i>Anthropocentrism</i>	Mengenali kepentingan manusia seutuhnya.
	Mengenali kepentingan masa depan manusia.
	Menggunakan perspektif manusia.

**Tabel 2.3 Variabel dan Indikator *Ecocentrism* dan *Anthropocentrism***  
(Sumber: Diterjemahkan dan diolah dari Eckersley, 1992)

Penggunaan teori ini berfungsi untuk menjelaskan kecenderungan pemberitaan dari media *Antarnews* dan *Republika* mengenai konflik reklamasi Teluk Jakarta yang mendukung analisis terhadap proses *agenda setting*. Hal yang difokuskan dengan penggunaan teori ini lebih pada isi berita bersifat *ecocentric* yakni lebih sering menjadikan lingkungan sebagai aspek yang ditekan untuk diinformasikan seperti pelestarian pulau reklamasi atau wilayah terdampak ataupun inisiatif dan pemberitaan lingkungan lainnya atau justru isi berita lebih berisfat *anthropocentric* yakni mengedepankan aspek kebutuhan manusia yang kurang lebih dalam konflik reklamasi Teluk Jakarta banyak ditekankan aspek ekonomi ataupun sosial. Sehingga teori ini bersifat sebagai teori pendukung serta mengarahkan penelitian dari proses *agenda setting* media ke konsep keamanan nasional.

#### **2.1.4 Konsep Sekuritisasi dalam Keamanan Nasional**

Keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis dan dibutuhkan kestabilannya sebagai prakondisi bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta

faktor-faktor dalam negeri yakni pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, interaksi masyarakat dan dinamika politik.<sup>34</sup> Salah satu visi dan misi pembangunan pertahanan negara adalah dengan mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.<sup>35</sup> Sehingga diperlukan pembangunan sistem pertahanan yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional dalam peningkatan kapasitas pertahanan.<sup>36</sup>

Laura Clearly dijelaskan dalam buku *National Security Policy* oleh Dr. Riant Nugroho, mengatakan bahwa konsep keamanan nasional merupakan konsep yang terlalu luas (*vague*) baik menurut akademisi, praktisi dan politisi.<sup>37</sup> Begitupula dalam buku putih pertahanan Indonesia yang konsep keamanan nasional sendiri belum dijelaskan secara tegas dan lugas, namun pada intinya keamanan nasional adalah bagian dari pertahanan negara yang harus ditingkatkan. Sehingga pada penelitian ini, konsep keamanan nasional berangkat dari gagasan/ide dari Dr. Riant Nugroho bahwa keamanan nasional dapat ditingkatkan melalui kebijakan publik yang jelas.<sup>38</sup> Kebijakan publik yang jelas tidak terlepas dari menentukan mengenai apa itu keamanan nasional dan bagaimana keamanan nasional menurut berbagai sudut pandang. Penelitian ini berusaha mengkaji berbagai sudut pandang mengenai keamanan nasional, utamanya keamanan nasional yang dapat diwujudkan melalui *cyber space* yakni upaya mewujudkan keamanan nasional melalui informasi portal berita yang dikaji. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Candice Tran Dai yakni bahwa *cyber space* juga dapat difungsikan oleh

---

<sup>34</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, hlm. 27

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 36

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 40

<sup>37</sup> Dr. Riant Nugroho, 2014, *National Security Policy: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 15

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 2

negara sebagai alat pertahanan kedaulatan yang mana pemerintah suatu negara dapat melindungi keamanan nasionalnya melalui pemanfaatan dunia siber yang terkait erat dengan aspek-aspek lain seperti sosial dan ekonomi.<sup>39</sup>

Upaya peningkatan keamanan nasional yang dapat dilakukan adalah melalui sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan sebuah konsep yang menjadi pusat dari *Copenhagen School*. Sekuritisasi dicetuskan oleh Ole Waever dan Barry Buzan.

*“Securitization, first outlined in depth by Wæver in 1995, refers to the discursive construction of threat. More specifically, securitization may be defined as a process in which an actor declares a particular issue, dynamic or actor to be an ‘existential threat’ to a particular referent object. If accepted as such by a relevant audience, this enables the suspension of normal politics and the use of emergency measures in responding to that perceived crisis.”<sup>40</sup>*

Berdasarkan kutipan diatas, Waever menyatakan bahwa konsep sekuritisasi didasari bahwa penetapan ancaman berasal dari konstruksi diskursif<sup>41</sup> atau dengan kata lain adalah *socially constructed*.<sup>42</sup> Sekuritisasi merupakan proses penetapan ancaman oleh aktor. Dalam hal ke-negaraan, suatu negara dapat merumuskan ancaman berupa isu tertentu, dinamika regional, aktor lain ataupun negara lain sebagai ancaman eksistensial. Hal tersebut apabila didukung oleh masyarakat nasional maka akan menjadi sesuatu yang dianggap sebagai ancaman nyata walau hal tersebut sebelumnya tidak dianggap sebagai ancaman secara militer.

*“Security is thus a self referential practice, because it is in this practice that the issue becomes a security issue – not necessarily*

<sup>39</sup> Fitriani, dkk (CSIS), 2019, *Towards a Resilient Regional Cyber Space Security: Perspective and Challenges in South East Asia*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 68

<sup>40</sup> Paul D. Williams, 2008, *Security Studies: An Introduction*, New York: Routledge

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Dr. Riant Nugroho, 2014, *National Security Policy: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 16

*because a real existential threat but because the issue is presented as such a threat*<sup>43</sup>

Penelitian ini melihat bahwa sekuritisasi pada era digital ini tidak hanya dapat diciptakan oleh negara. Negara atau pemerintah justru dapat menggunakan ruang siber berupa portal berita yang dikelola *non state actor* untuk mengempulkanserta menyatukan persepsi-persepsi keamanan nasional dari media serta lembaga-lembaga yang memiliki peran di masyarakat. Sehingga nantinya akan dihasilkan rekomendasi bagi pemerintah dan media massa untuk mampu mengkonstruksi keamanan nasional.

### 2.1.5 Dialektika

Dialektika dalam penelitian ini digunakan sebagai rekomedasi bagi media massa portal berita guna meningkatkan keamanan nasional. Hal tersebut dikarenakan dengan melakukan dialektika, diharapkan media mampu mengambil gagasan-gagasan dari pemberitaan yang membangun dalam penyelesaian konflik reklamasi Teluk Jakarta.

Dialektika merupakan salah satu unsur filsafat yang dikemukakan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dialektika menunjukkan cara berpikir yang terus-menerus. Tidak ada realitas ataupun pengetahuan yang terisolasi<sup>44</sup> (tidak berhenti melainkan bergerak secara progresif), namun akan selalu mengalami proses yang disebut dengan dialektika. Dasar utama dari dialektika adalah *Aufheben*<sup>45</sup> atau *Aufhebung*<sup>46</sup> yakni tindakan menyangkal sekaligus memelihara dan meninggikan. Sebuah pernyataan disebut dengan tesis, pasti memiliki negasi atau pernyataan lain yang menyangkal yang disebut dengan antitesis. Sementara sintesis merupakan intisari atau pernyataan yang menyatukan (atau mengangkat)

---

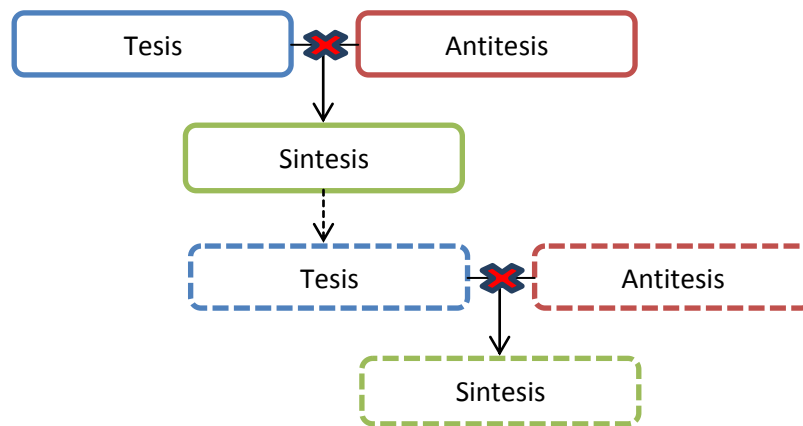
<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Franz Magnis-Suseno, 1999, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia, hlm. 61

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Angelica Nuzzo, *Dialectic, Understanding, and Reason: How Does Hegel's Logic Begin?* Dalam Nectarios G. Limnatis, 2010, *The Dimensions of Hegel Dialectic*, London: Continuum International Publishing Group, hlm. 12

gagasan positif dari tesis maupun antitesis. Proses tersebut dapat dilihat melalui bagan berikut.



**Bagan 2.2 Kerangka Dialektika menurut Hegel  
(diolah berdasarkan pemahaman dialektika Hegel)**

Proses dialektika tidak berhenti hanya dengan menemukan sintesis, namun proses tersebut selalu berjalan yang mana sebuah sintesis merupakan tesis baru yang pastinya memiliki antitesis dan nantinya akan ada sintesis terhadapnya. Dialektika Hegel pada penelitian ini digunakan hanya untuk mencapai sintesis pada proses pertama, yakni ada tesis reklamasi (bahwa reklamasi merupakan hal yang baik dilakukan), kemudian terdapat antitesis (bahwa reklamasi seharusnya tidak dilakukan), sehingga muncul sintesis terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama dari sebuah jurnal karya Nicole Yang Lai Fong yang berjudul *Framing Analysis of a Conflict: War/Peace Journalism*, yakni menggunakan teori *War and Peace Journalism* yang digagas oleh Johan Galtung yang juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam jurnal tersebut Nicole Fong menggunakan koran *Sin Chew Daily* sebagai subjeknya yakni koran berbahasa Tiongkok yang terbit di Malaysia dan diabatasi pada isu pemilu. Penelitian terdahulu yang kedua merupakan penelitian komunikasi

dan informasi dibawah Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, penentuan *tone* berita yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari penentuan *tone* berita pada penelitian tersebut. Kemudian jurnal dari Dewan Pers Indonesia yakni kumpulan jurnal yang ditulis oleh para profesional dan kebanyakan berprofesi sebagai dosen komunikasi di Indonesia, salah satu yang peneliti gunakan adalah tulisan Dr. Hartini yang mengatakan bahwa media memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan *agenda setting* yang ditetapkan. Fakta lingkungan reklamasi dalam penelitian ini merupakan fakta yang diambil dari KLHK dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga beberapa merujuk pada buku yang diterbitkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

Kelebihan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih berfokus pada *agenda setting* dan juga refleksi melalui perspektif keamanan nasional. Hal tersebut menghasilkan keunikan tersendiri ketika cabang ilmu pertahanan di bidang keamanan nasional dapat digunakan untuk mengaplikasikan unsur-unsur yang bersifat *nir-militer* seperti media. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu:

No.	Judul	Penulis	Teori dan Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	"Framing Analysis of a Conflict: War/Peace Journalism" ( <i>The Journal of the South East Asia Research Centre for Communications and Humanities</i> , Vol. 1 No. 1, 2009, pp 17-32, ISSN 1985-9414)	Nicole Yang Lai Fong	<i>War and Peace Journalism</i>	Menggunakan <i>War and Peace Journalism</i> dalam mendeteksi kecenderungan pemberitaan media.	Pada jurnal tersebut, penelitian dilakukan dengan menganalisis pemberitaan pada surat kabar (koran) <i>Sin Chew Daily</i> di Malaysia dan indikator <i>War and Peace Journalism</i> -nya mengalami sedikit modifikasi untuk memudahkan peneliti mengkalkulasikan berita.
2.	Analisis Wacana Media terhadap Kebijakan dan Citra Pemerintah di Surat Kabar Daerah pada Tahun 2017 (Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan) Vol. 19 No 2 Desember 2018)	Syarif Budhirianto, Noneng Sumiaty, Syaidah	Analisis Tone Pemberitaan	Menganalisis berita berdasarkan <i>tone</i> positif (mendukung), negatif (tidak mendukung) dan netral (tidak berpihak)	Surat kabar merupakan media massa yang digunakan dalam penelitian terdahulu, sementara penelitian ini menggunakan media daring berupa portal berita.
3.	<i>Jurnal Dewan Pers Edisi 15</i> Tahun 2017, hlm. 47: "Bisnis Media dan Jurnalisme di Persimpangan: Keberpiakan Jurnalisme Media Internet"	Dewan Pers, artikel oleh Dr. Artini (Dosen Universitas LSPR)	Karakteristik dan Keberpiakan Media	Persamaannya Dr. Artini menjelaskan mengenai karakteristik media online berupa portal berita.	Proposal tesis menggunakan <i>Antarnews</i> dan <i>Republika</i> sebagai media <i>online</i> yang akan diteliti, sementara Dr. Artini menggunakan <i>Detik</i> , <i>Cumicumi</i> dan <i>Liputan 6</i> .

4.	Selamatkan Teluk Jakarta	Koalisi Pakar Interdisiplin	Kronologi dan Fakta Konflik Reklamasi Teluk Jakarta	Tesis menggunakan kronologi dan fakta lingkungan yang ada dari penelitian yang dilakukan kelompok interdisipliner.	Perbedaannya bahwa buku yang diterbitkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ini fokus pada kebijakan Pemerintah yang menggiring opini publik sementara pada proposal tesis menggunakan media online sebagai alat penggiring opini publik.
5.	Persaingan Tujuh Portal Berita Online Berdasarkan Analisis Uses and Gratifications	Pupung Arifin (Dosen Universitas Indonesia)	Tingkat Popularitas Media Online	Menggunakan media <i>online</i> populer yang berskala nasional.	Penelitian tesis ini berusaha mengetahui <i>Agenda Setting</i> media online berupa portal berita berskala nasional dan juga sasaran pembacanya.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran dari suatu fenomena secara jelas dan apa adanya. Penelitian kualitatif dilakukan guna mendapatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pencarian makna dari sebuah data dan fenomena sehingga struktur dari permasalahan dapat diketahui. Interpretasi data dalam penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi kerumitan, keseluruhan, dan kedalaman sebuah fenomena.<sup>47</sup>

Pada penelitian kualitatif, proses analisis datanya bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan.<sup>48</sup> Pendekatan dalam penelitian ini merupakan studi kasus sekaligus analisis isi, yakni peneliti menetapkan suatu isu/fenomena tertentu kemudian dikaji lebih dalam serta menggunakan teks pemberitaan untuk memperkuat data akan isu/fenomena yang dikaji.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Lokus pada penelitian ini terbagi menjadi lokus maya dan lokus fisik. Lokus maya antara lain adalah *website ANTARA News* yakni *antaranews.com* dan juga *website Republika Online* yakni *republika.co.id*. Lokus fisik dalam penelitian ini terletak di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Direktorat Informasi Kementerian Komunikasi, Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta, Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Dirjen PPKL KLHK, Persatuan

---

<sup>47</sup> S. Wahyuni, "Qualitative Research Method", (Jakarta: Salemba Empat, 2012)

<sup>48</sup> John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", Second Edition, (University of Nebraska, Lincoln : SAGE Publications, 2003), hlm 205



- b. Redaktur Pelaksana Desk. Nasional Republika.co.id yakni Bayu Hermawan.
- c. Kasubdit Inventarisasi dan Status Mutu Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Heny Agustina.
- d. Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta yakni Habib Setiawan S.Sos, M.Si.
- e. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta yakni Syali Gestanon.
- f. Direktur Riset dan Komunikasi Publik Persatuan Wartawan Indonesia yakni Agus Sudibyo.
- g. Akademisi di bidang Komunikasi, yakni Dr. Puspitasari, M.Si

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan observasi teks berita, wawancara terhadap subjek penelitian, dan studi dokumensebagai teknik pengumpulan data sehingga akan terkumpul data primer maupun data sekunder, berikut rinciannya:

#### **a) Observasi**

Peneliti menggunakan observasi terhadap teks berita kedua objek media daring mengenai Konflik Reklamasi Teluk Jakarta pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2017, namun difokuskan pada periode pemberitaan dengan *traffic* tinggi mengenai pemberitaan isu tersebut.

#### **b) Wawancara**

Wawancara dilakukan guna mengumpulkan informasi berupa data primer dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Pihak yang diwawancara antara lain yang sudah disebutkan dalam subjek dan sampel penelitian. Hasil dari wawancara tersebut merupakan data primer bagi penelitian.

### c) Studi Dokumen

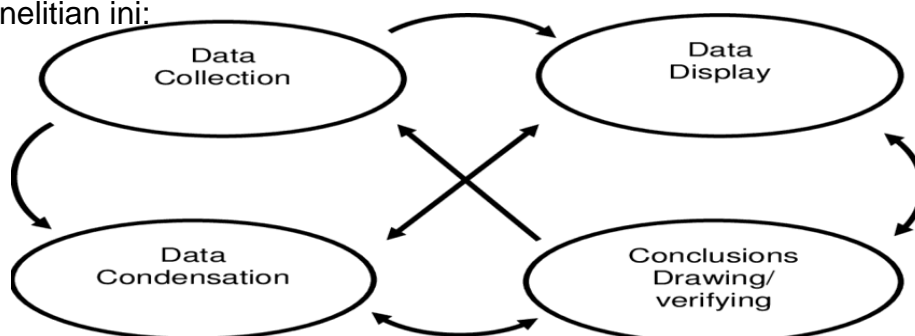
Studi dokumen dilakukan guna mengumpulkan data sekunder penunjang penelitian, antara lain dampak lingkungan dari reklamasi, Undang-Undang yang mengatur, serta mengenai kaidah-kaidah jurnalisme.

### 3.5 Pemeriksa Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini melalui triangulasi data, yakni dilakukan dengan melakukan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah mengkolaborasikan ketiga teknik pengumpulan data yakni *observasi*, wawancara, dan juga studi dokumen sehingga akan terlihat adanya persamaan dan perbedaan yang harus diteliti lebih dalam untuk menghasilkan data kesimpulan yang kredibel.<sup>50</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldanayakni setelah pengumpulan data, maka dilakukan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>51</sup> Berikut bagan teknik analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana yang diadopsi pada penelitian ini:



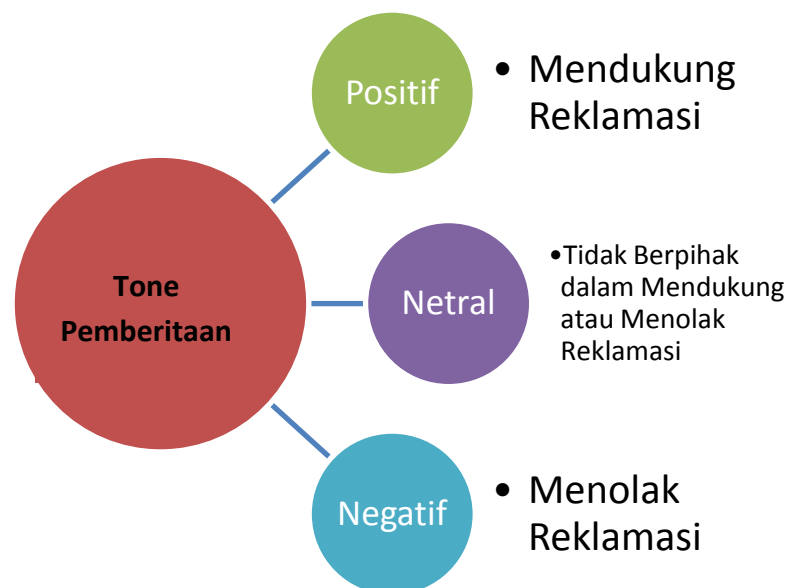
<sup>50</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (terjemahan), Jakarta: UI-Press, hlm. 16

<sup>51</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Saldana J., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Arizona State University

### Bagan 3.1 Teknik Analisis Data menurut Miles, Huberman dan Saldana

Setelah pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen/literatur, data di kondensasi yakni dipilah mana data yang mendukung atau dapat digunakan pada penelitian ini dan mana yang tidak. Setelah data di kondensasi atau disaring kemudian dilakukan *display data* yang dalam hal ini sebenarnya keseluruhan data obeservasi dan hasil wawancara akan ditampilkan dalam lampiran sementara yang ditampilkan dalam tubuh karya ilmiah ini merupakan data yang telah disaring. Setelah menunjukkan dan menjabarkan data yang didapat kemudian dilakukan penjabaran dan penarikan kesimpulan, pembuktian asumsi serta pemberian rekomendasi.

Analisis *tone* berita yang digunakan merujuk pada penelitian terdahulu dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, yakni ada *tone* positif, *tone* negatif dan *tone* netral. *Tone* dikatakan positif apabila mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta. *Tone* pemberitaan negatif jika menolak ide proyek reklamasi Teluk Jakarta. *Tone* pemberitaan netral yakni tidak berpihak dalam mendukung atau menolak reklamasi Teluk Jakarta.



Bagan 3.2 Penentuan *Tone* Pemberitaan

Analisis berita juga menggunakan *war and peace journalism* dari Johan Galtung dan juga *green theory* dari Robyn Eckersley dengan menggunakan indikator teori yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Berita-berita yang telah dianalisis kemudian dihitung dan dijadikan persentase kemudian di-*display* hanya dalam bentuk diagram hasil persentasenya, sementara data analisis berita dari tiap media dan tiap indikator terdapat pada lampiran, hal tersebut tetap dilakukan dalam ranah penelitian kualitatif karena analisis menggunakan peneliti sebagai instrumen utama serta perhitungan hanya digunakan untuk memudahkan penyaji data.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian merupakan hasil observasi terhadap analisis konten berita yang diolah dari media daring yang dipilih yakni *ANTARA News* dan *Republika Online* mengenai konflik reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017. Kemudian olahan dari data wawancara bersama narasumber yakni Teguh Priyanto selaku Redaktur Pelaksana *ANTARA News*, Bayu Hermawan selaku Redaktur Pelaksana *Desk Nasional Republika Online*, Agus Sudibyo selaku Direktur Riset dan Komunikasi Publik Persatuan Wartawan Indonesia (juga merupakan perwakilan Dewan Pers Indonesia untuk PWI), Syali Gestanon selaku Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta, Habib Setiawan, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta dan Heny Agustina selaku Kasubdit Inventarisasi dan Status Mutu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

#### **4.1.1 ANTARA News dan Republika Online dalam Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2017**

##### **4.1.1.1 ANTARA News**

##### **4.1.1.1.1 Visi, Misi dan Informasi Singkat**

LKBN ANTARA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yang bergerak dalam penyedia berita-berita berskala nasional yang tidak langsung menyentuh pembaca (*end user*), melainkan memiliki pelanggan dari media-media lokal. Seiring berkembangnya era digital, LKBN ANTARA mengeluarkan produk-produk yang memanfaatkan dunia digital, salah satunya dengan didirikannya *ANTARA News* yang dapat diakses melalui alamat web *antaranews.com*.

Visi dan Misi dari *ANTARA News* merupakan visi dan misi turunan dari LKBN ANTARA. Visi dari LKBN ANTARA adalah menjadi Kantor Berita berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia, sementara misinya yang pertama adalah memperkuat marwah LKBN ANTARA sebagai sebuah kantor berita serta perusahaan multimedia yang modern.<sup>52</sup> Visi dan misi tersebut ada dikarenakan LKBN ANTARA merupakan satu-satunya kantor berita nasional milik Pemerintah Indonesia sehingga menjadi sebuah keharusan bagi LKBN ANTARA untuk memiliki standar internasional.

Misi yang kedua adalah mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>53</sup> Hal tersebut merupakan pedoman bagi *ANTARA News* dalam melakukan pemberitaan yakni mengeluarkan berita yang bersifat 3E+1N (*Educating, Enlightening, Empowering, dan Nasionalisme*). *ANTARA News* berupaya mengelola opini dari berbagai kalangan dengan menimbang aspek 3E+1N tersebut. Pihak *ANTARA News* mengatakan berita-berita dari opini pihak-pihak yang ingin merusak suasana atau merusak demokrasi tidak akan diberitakan.

Misi yang ketiga yakni menyediakan produk serta jasa informasi dan komunikasi yang akurat, terpercaya serta menguntungkan di bidang multimedia<sup>54</sup>, mengingat bahwa ANTARA merupakan kantor berita nasional yang berkerja melalui penyediaan berita untuk didistribusikan ke media-media mitra (atau disebut media konsumen, salah satunya Kompas) untuk dipublikasikan atau disebarluaskan, baik secara cetak maupun *online* sehingga ANTARA harus mengedepankan kredibilitas berita. Keberadaan *ANTARA News* juga dijadikan sebagai rujukan atas

---

<sup>52</sup>Visi & Misi LKBN ANTARA, diakses melalui <https://korporat.antaranews.com/tentang/visi-misi> pada 17 November 2018.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

kebenaran berita yakni *ANTARA News* merupakan portal *web* berita dari LKBN ANTARA yang langsung dapat diakses oleh pembaca.

Misi yang terakhir adalah mengembangkan perusahaan yang modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para *stakeholder*-nya.<sup>55</sup> Teguh Priyanto<sup>56</sup> mengatakan bahwa revolusi digital sudah dilakukan ANTARA walaupun hingga saat ini ANTARA masih tetap mencari bentuk. Pada awalnya bisnis tradisional ANTARA adalah kantor berita, yakni sebuah lembaga pers yang pada hakikatnya tidak menjangkau langsung ke pembaca (*selaku end user*). Hal tersebut membuat LKBN ANTARA berpikir bahwa ANTARA tidak bisa hidup hanya dari pelanggan media. Dahulu, ANTARA menyuguhkan berita paling cepat kepada pelanggan melalui Tel-ex, V-Set, dan lainnya, namun di era digital ketika semua orang mampu mengakses informasi, maka ANTARA juga mengikuti perkembangan digital dengan mengeluarkan *ANTARA News*. Melalui *ANTARA News* masyarakat bisa langsung mengakses berita dari sumbernya (yakni LKBN ANTARA) melalui akses ke laman ANTARA News. Selain itu untuk menunjang misi ke 4 (empat), ANTARA juga memiliki Departemen Viral dan Radar yang difungsikan sebagai pengumpul *trending topic* (isu yang sedang naik daun/tren) agar tidak tertinggal dari tren diskursus yang ada di masyarakat serta mampu melakukan penangkalan dan pencegahan *hoax* melalui penelusuran oleh unit khusus bernama JACH (Jaringan ANTARA Cegah *Hoax*) dalam departemen tersebut, sehingga berita yang dihasilkan LKBN ANTARA dapat terjaga kredibilitas, validitas dan kebaruannya sesuai opini atau diskursus yang sedang berkembang di masyarakat.

LKBN ANTARA pada dasarnya memang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, *stakeholder* utamanya adalah

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Teguh Priyanto adalah Redaktur Pelaksana *ANTARA News* yang diwawancarai oleh peneliti pada 10 Oktober 2018 di Wisma ANTARA, Jakarta Pusat

Pemerintah Republik Indonesia. Teguh Priyanto berkata bahwa *ANTARA* adalah sebuah perusahaan yang sumber utamanya merupakan sumber bisnis yakni dengan berjualan dan harus memperhitungkan efisiensi *cost and benefit* agar tetap hidup/mempertahankan eksistensinya. Namun apabila dilanda kerugian atau ketidakcukupan modal untuk beroperasi, maka diberikan *Public Service Obligation* (PSO) oleh Pemerintah Indonesia dikarenakan LKBN ANTARA adalah satu-satunya media penyedia berita dan portal berita *online* yang beroperasi milik Pemerintah Indonesia (disisi lain pemerintah juga memiliki TVRI dan RRI di bidang penyiaran). PSO antara lain adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk mempertahankan perusahaan BUMN di sektor-sektor strategis agar tetap beroperasi. Walau merupakan BUMN Pemerintah Indonesia dan dapat diberikan PSO oleh pemerintah, *ANTARA News* juga tetap mematuhi kode etik jurnalistik dan juga tetap melakukan kritik pada pemerintah jika memang itu yang diperlukan, serta dikatakan juga bahwa kritik yang disuguhkan harus bersifat konstruktif dibanding destruktif.

Mengenai pemberitaan di *ANTARA News*, kepentingan pemerintah dan kepentingan *ANTARA News* sesuai visi dan misi memiliki banyak kesamaan atau pertemuan, sehingga lebih banyak pemberitaan *ANTARA News* (yakni berpedoman pada 3E+1N) yang didukung oleh pemerintah. Jika memang ada pemberitaan yang sensitif dan akan berdampak tidak sesuai 3E+1, maka *ANTARA News* lebih memilih untuk mengoreksi diri sendiri (seperti menurunkan berita atau melakukan rapat internal) sebelum pemerintah bertindak.

Teguh Priyanto juga memaparkan bahwa tidak ada hak atau *privilege* tertentu yang diterima pewarta/reporter ANTARA sebagai BUMN Pemerintah dalam mengakses sumber-sumber informasi terutama informasi-informasi yang menyangkut isu sensitif seperti reklamasi Teluk Jakarta, hanya saja ANTARA yang dikenal sebagai BUMN memiliki

kedekatan-kedekatan dengan instansi lain terutama milik pemerintah ketika melakukan peliputan berita.

#### **4.1.1.1.2 Proses *Editorial Policy* ANTARA News**

Media baik daring maupun konvensional memiliki *standing point* yang digambarkan melalui *agenda setting* media tersebut. Menurut *ANTARA News*, *standing point* dirumuskan melalui kebijakan editorial atau *editorial policy*. *Editorial policy* *ANTARA News* dirancang oleh Dewan Redaksi yang merupakan *central desk* dengan susunan yang terdiri dari 1 (satu) Pemimpin Redaksi dan 4 (empat) Redaktur Pelaksana. *Central desk* berkuasa penuh atas penentuan kebijakan tersebut. Walaupun di atas Pemimpin Redaksi terdapat posisi Direktur, namun sepenuhnya kebijakan tersebut terpusat pada *central desk*. *Editorial policy* juga harus disusun sesuai dengan visi dan misi dari *ANTARA News* yang dirangkum dalam 3E+1N.

Teguh Priyanto mengatakan bahwa *editorial policy* *ANTARA News* tidak memberikan *framing* tertentu atau khusus dalam pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta. Ada banyak sekali pihak yang berperan dalam konflik tersebut, sehingga *ANTARA News* mencoba lebih berimbang dalam memberitakan. Pihak yang disorot dalam pemberitaan menurut Teguh antara lain KLHK, Pemprov DKI, Pemerintah Pusat, Kemenkomaritim, Pengusaha dan pihak-pihak lain. *ANTARA News* tidak bersikap menolak ataupun mendukung reklamasi karena media tersebut memiliki pandangan bahwa reklamasi memiliki sisi positif dan juga negatif. Sisi negatif menurut Teguh adalah dari aspek kawasan nelayan yang terkena dampak, sementara sisi positifnya berasal dari pengembangan ekonomi yang besar serta memitigasi sejumlah persoalan sosial di Jakarta yang sesuai dalam *grand strategy* pembangunan Teluk Jakarta yakni salah satunya adalah mengurangi persoalan banjir. Sehingga dapat disimpulkan positif dari aspek makro, namun negatif dari aspek mikro (seperti kehidupan nelayan) yang juga perlu diperhatikan efeknya. Posisi

*ANTARA News* lebih pada posisi mencerahkan dibanding menolak atau mendukung.

Pada tahun 2017, *agenda setting ANTARA News* adalah Pemilukada DKI Jakarta karena memiliki magnitudo yang sangat besar. Hal tersebut menyebabkan konflik reklamasi Teluk Jakarta hanya menjadi *sub issue* dari Pemilukada DKI Jakarta 2017. Walaupun merupakan *sub issue* namun konflik reklamasi Teluk Jakarta tetap disorot karena konflik tersebut erat kaitannya dengan politik pemilu. Sehingga prioritas dan porsi utama pemberitaan *ANTARA News* di tahun 2017 adalah seputar Pemilukada dan dinamika politik ibukota, bukan reklamasi Teluk Jakarta.

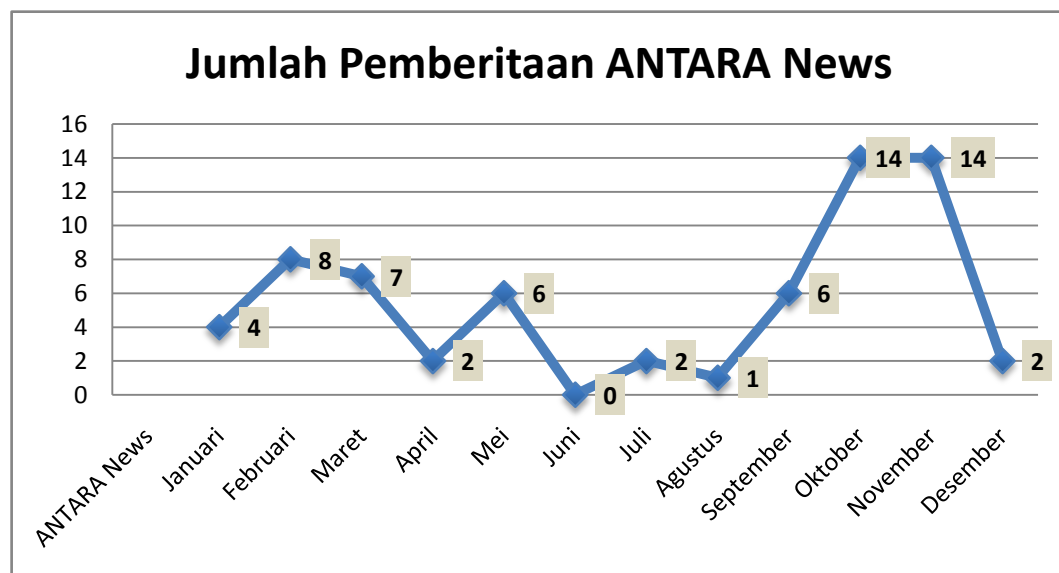
Teguh Priyanto menegaskan bahwa dalam memberitakan suatu isu pada kurun waktu tertentu, pemberitaan *ANTARA News* dikontrol secara kuantitas. Apabila terdapat 5 (lima) berita mengenai petahana, maka harus ada kurang lebih 5 (lima) berita juga yang memberitakan mengenai oposisi. Proses kontrol kuantifikasi ini lebih sering dilakukan paling cepat setiap 1 (satu) minggu atau kurun waktu yang ditentukan. Sehingga diharapkan masyarakat dapat melihat keberimbangan (*fairness*) dari *ANTARA News* yang dikatakan Teguh masih berada di posisi tengah dalam pandangan masyarakat. Kuantifikasi berita juga dilakukan terhadap berbagai pemberitaan, salah satunya yakni pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta.

Teguh juga mengatakan bahwa setiap media memiliki tajuk, namun tidak bagi *ANTARA News*. Hal tersebut menjadikan pemilihan narasumber merupakan satu-satunya opsi bagi *ANTARA News* untuk beropini mengenai suatu fenomena, namun *ANTARA News* tetap mengambil narasumber pemberitaan dari kedua belah sisi yang kontradiktif dari reklamasi Teluk Jakarta. Sikap positif dikembangkan *ANTARA News* dalam pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta dengan menunjukkan keuntungan dan kerugian reklamasi agar masyarakat mampu menimbang

informasi sehingga polemik dapat diredam. Pemilihan narasumber juga membuat media memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat, pemerintah, pengamat (akademisi) dan lainnya selama masih dalam koridor kerangka umum visi dan misi.

#### 4.1.1.1.3 Pemberitaan *ANTARA News* mengenai Konflik Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2017

*ANTARA News* mengeluarkan 66(enam puluh enam) berita mengenai Reklamasi Teluk Jakarta pada tahun 2017. Jumlah yang tidak terlalu banyak dalam memberitakan suatu isu besar dikarenakan fokus dari *ANTARA News* bukanlah mengenai reklamasi Teluk Jakarta melainkan lebih berfokus pada Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) DKI Jakarta 2017. Reklamasi dianggap sebagai salah satu *sub issues* atau isu-isu yang merupakan turunan dari persoalan Pilkada DKI Jakarta yang keberadaannya dapat memberikan pengaruh terhadap kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Jumlah pemberitaan mengenai reklamasi Teluk Jakarta cukup fluktuatif (dapat dilihat dalam bagan berikut).



**Bagan 4.1** Jumlah Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta dari *ANTARA News* Tahun 2017

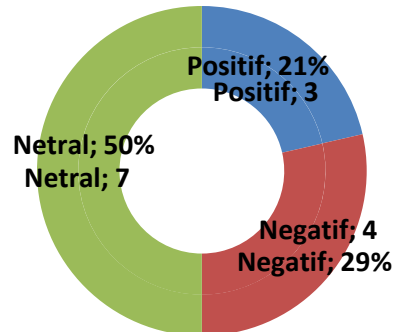
Pada bulan Februari, ketika Pilkada DKI melangsungkan putaran pertama, *ANTARA News* masih mengawal berita mengenai reklamasi

dengan mengeluarkan 8 (delapan) berita mengenai reklamasi Teluk Jakarta, sementara pada putaran kedua ketika masa pemilu lebih pelik dan sensitif, *ANTARA News* hanya memberitakan 2 (dua) berita mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Hal tersebut dimungkinkan karena *main issue* bagi *ANTARA News* sedang naik/menjadi *trending*. Kemudian pada bulan Oktober ketika pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, berita mengenai Reklamasi Teluk Jakarta diangkat kembali hingga terdapat 14 (empat belas) berita yang dinaikkan yakni jumlah yang besar dalam kurun waktu 1 tahun atau 21% dari pemberitaan reklamasi yang memang 50% dari keseluruhan pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta ada pada 4 (empat) bulan terakhir di tahun 2017. *Traffic* pemberitaan mengenai reklamasi Teluk Jakarta yang meningkat dan mencapai titik tertinggi pada bulan Oktober 2017 menjadikan bulan Oktober 2017 sebagai fokus pada penelitian ini.

*ANTARA News* dalam pemberitaannya mengenai reklamasi pada tahun 2017 memilih berbagai narasumber. Teguh Priyanto mengatakan bahwa pemilihan narasumber oleh suatu media merupakan salah satu bentuk bagaimana media beropini. Berdasarkan pemilihan narasumber, posisi pemberitaan *ANTARA News* belum dapat diketahui secara signifikan, namun apabila ditelaah lebih lanjut mengenai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan narasumber dapat terlihat *tone* dari berita yang dinaikkan. Sebuah berita dapat berisi beberapa narasumber dan terdapat 1 (satu) atau lebih pernyataan dari narasumber sehingga *tone* dapat terbagi menjadi positif, negatif dan netral.

Dalam penelitian ini, berita diklasifikasikan memiliki *tone* pemberitaan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni positif, negatif dan netral. Berikut merupakan diagram mengenai *tone*

pemberitaan ANTARA News pada Oktober 2017 yang mengandung sebanyak total 14 berita<sup>57</sup>:



**Bagan 4.2** Tone Pemberitaan ANTARA News 2017 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan, dari total 14 (empat belas) berita pada Oktober 2017, terdapat 7 (tujuh) berita netral atau sekitar 50%, kemudian 4 (empat) berita dengan *tone* negatif yakni sebesar 29%, serta 3 (tiga) berita dengan *tone* positif atau setara dengan 21%.

Pemberitaan dalam penelitian ini juga diklasifikasikan dengan menggunakan indikator *war and peace journalism* sesuai dengan yang dikemukakan Johan Galtung dengan menggunakan metode analisis isi berita kemudian dihitung berapa banyak berita yang cenderung *war* atau *peace journalism*, seperti metode yang digunakan oleh Nicole Yang Lai Fong dalam penelitian terdahulu. Berikut persentase pemberitaan ANTARA News dalam kerangka *war and peace journalism*:

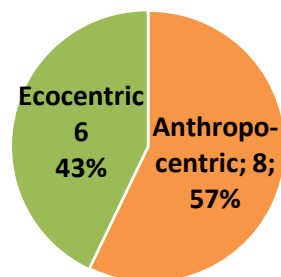


**Bagan 4.3** Persentase war and peace ANTARA News pada Oktober 2017

<sup>57</sup>Data analisis *tone* berita ANTARA News mengenai Reklamasi Teluk Jakarta, Oktober 2017 terlampir pada Lampiran hlm. 3-1

Pada Oktober 2017, 14 (empat belas) atau 100% berita reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan *ANTARA News* seluruhnya bersifat *peace journalism*.<sup>58</sup> Hal tersebut merupakan sebuah langkah yang baik dikarenakan *ANTARA News* memenuhi kaidah jurnalisme yang dicetuskan Johan Galtung.

Fokus berikutnya adalah mengenai porsi pemberitaan lingkungan melalui pendekatan *Green Theory* dari Eckersley yang dapat dilihat melalui pembagian *ecocentric* dan *anthropocentric* seperti indikator yang dikemukakan Eckersley. Berikut hasil dari analisis dari pemberitaan *ANTARA News* pada Oktober 2017:



**Bagan 4.4 Presentase *Green Theory*: Ecocentric dan Anthropocentric dalam Pemberitaan *ANTARA News* pada Oktober 2017 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta**

Berdasarkan data hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini,<sup>59</sup> *ANTARA News* cukup mengangkat isu lingkungan dalam konflik reklamasi Teluk Jakarta pada Oktober 2017. Hal tersebut dikarenakan dari 14 (empat belas) berita yang dimuat, perbedaan antara keduanya tidak jauh yakni 6 (enam) berita atau 43% yang didominasi oleh lingkungan (*ecocentric*) dan 8 (delapan) berita atau 57% yang fokus terhadap kepentingan manusia (*anthropocentric*).

<sup>58</sup> Data analisis klasifikasi *war and peace journalism* berita *ANTARA News* mengenai Reklamasi Teluk Jakarta, Oktober 2017 terlampir pada Lampiran hlm. 3-10

<sup>59</sup> Data analisis *ecocentric* dan *anthropocentric* berita *ANTARA News* mengenai Reklamasi Teluk Jakarta, Oktober 2017 terlampir pada Lampiran hlm. 3-5

#### 4.1.1.2 Republika Online

##### 4.1.1.2.1 Visi, Misi dan Informasi Singkat

*Republika* saat ini merupakan anak perusahaan dari Mahaka Group yakni perusahaan multimedia yang cukup besar di Indonesia. Pada awalnya *Republika* didirikan sebagai surat kabar harian bagi komunitas Muslim di Indonesia. Surat kabar tersebut mengalami kebangkrutan hingga akhirnya diakuisisi oleh Mahaka Group. Seiring berkembangnya era digital, maka surat kabar di Indonesia juga melakukan perkembangan dengan menggunakan *platform* digital berupa portal berita *online*, termasuk *Republika* yang mengembangkan *Republika Online* (atau biasa disingkat dengan ROL) dengan alamat web *republika.co.id*.

*Republika Online* memiliki visi sebagai media daring yang terintegrasi dan unggul.<sup>60</sup> Misi dari *Republika Online* yang pertama adalah membangun Umat Islam yang moderat, cerdas dan berdaya.<sup>61</sup> Misi yang kedua adalah menyuarakan aspirasi, gagasan dan suara masyarakat bagi terbangunnya demokrasi yang sehat dan berkesejahteraan.<sup>62</sup> Misi yang ketiga adalah menciptakan manajemen yang sehat dan efektif.<sup>63</sup> Visi dan misi tersebut membuat *Republika Online* lebih mengedepankan pemberitaan mengenai hal-hal krusial yang berdampak bagi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bayu Hermawan selaku Redaktur Pelaksana Desk Nasional *Republika Online*, dikatakan bahwa fokus dari *Republika Online* adalah mengeluarkan berita-berita yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga *Republika Online* tidak tertarik membahas isu-isu tidak bermanfaat seperti isu selebritis. *Republika Online* menghadirkan berita-berita yang kritis dan mencerdaskan masyarakat tanpa takut kehilangan pembaca dikarenakan telah memiliki pembaca tetap. Mencari *hit* ataupun *click viewer* bukan lagi persoalan karena memang *Republika*

---

<sup>60</sup> Visi dan Misi *Republika Online* (ROL), diakses melalui <https://www.republika.co.id/page/anniversary> pada 18 November 2018

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

*Online* termasuk media yang besar berskala nasional, apalagi merupakan media dengan basis pembaca adalah agama mayoritas di Indonesia sehingga saingan dari *Republika Online* bukanlah media massa sejenis melainkan media sosial dengan kemudahan akses dan kemajuan teknologinya. Sehingga untuk mempertahankan eksistensi, *Republika Online* juga merambah ke ranah media sosial dalam melakukan pemberitaan.

*Republika Online* mengatakan bahwa pemilik modal yakni Mahaka Group tidak pernah mengintervensi pemberitaan, sehingga independensi *Republika Online* masih terjaga dan tetap menjadikan kepentingan publik/masyarakat sebagai fokus utama, Bayu Hermawan mengatakan hal tersebut. Namun apabila ada pemberitaan yang kritis/sensitif dan dapat menimbulkan *fitnah* (sesuatu yang tidak benar) maka harus dirapatkan dalam rapat internal Dewan Redaksi. Sehingga peran pemilik modal hanya sebatas mengenai anggaran ataupun perputaran uang perusahaan, bukan pada konten berita yang disajikan oleh *Republika Online*, karena berita sepenuhnya adalah hak dan kewajiban redaksi.

*Republika Online* sebagai media daring milik swasta memiliki kendala dalam memberitakan konflik reklamasi Teluk Jakarta yakni akses terhadap informasi yang dikeluarkan pemerintah. Bayu Hermawan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terbuka dengan media, namun apabila ada rapat tertutup utamanya dengan pengembang maka sulit untuk mengakses informasi dari kegiatan tersebut.

#### **4.1.1.2.2 Proses Editorial Policy *Republika Online***

*Editorial policy* dari *Republika Online* merupakan kebijakan editorial yang berpihak pada masyarakat, khususnya umat Islam sebagai pembaca mayoritas *Republika Online*. Berpihak pada masyarakat yang dimaksud adalah dengan menyajikan berita-berita bermanfaat bagi pembaca. Bayu

Hermawan juga dengan tegas menegaskan *Republika Online* bukan lagi mencari pembaca ataupun *click viewer* dengan berita-berita yang tidak penting.

*Editorial Policy* disusun oleh Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana dan Asisten Redaktur Pelaksana. Proses penyusunannya dilaksanakan pada rapat internal dengan melihat dari seluruh sudut pandang, kemudian kebijakan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi pekerja lapangan (seperti reporter) agar selalu tetap dalam koridor tujuan pemberitaan *Republika Online* dan tidak terbawa arus pernyataan narasumber yang dikatakan Bayu Hermawan selalu memiliki kepentingan. Sehingga pekerja lapangan mampu meluruskan informasi ketika melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki kecenderungan.

Pemberitaan konflik reklamasi Teluk Jakarta diawali dengan kebijakan editorial untuk mendudukkan reklamasi dari tujuan awalnya. Bayu Hermawan mengatakan bahwa proses reklamasi Teluk Jakarta sudah sangat panjang yakni dari zaman Orde Baru, hanya saja pada setiap rezim yang berkuasa selalu ada ada yang menumpang untuk mencari keuntungan tertentu. Diawali dengan tujuan menambah hunian dan mencegah abrasi di era Soeharto kemudian beralih ke tujuan komersil, padahal kalau ingin menambah hunian seharusnya dapat memanfaatkan hunian vertikal dan memanfaatkan daerah-daerah pinggir Jakarta, kata Bayu. Bukan mendorong untuk menutup laut, karena laut ditutup pasti ada efeknya, lanjutnya. Daerah reklamasi yang tujuan awalnya belum tercapai dan malah bergeser menjadi pembangunan kawasan elit membuat *Republika Online* peduli atas ketidakadilan tersebut dan mengawal reklamasi melalui pemberitaan agar ketika tidak bisa lagi ditolak untuk dibangun maka pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dapat sesuai dengan tujuan awalnya.

Berlandaskan kegiatan mengawal reklamasi, maka prioritas pemberitaan *Republika Online* dalam *agenda setting*-nya adalah reklamasi Teluk Jakarta dan menjadi *main issue* yang berkembang menjadi *hot issue* di tahun 2017. Bayu Hermawan juga mengatakan bahwa isu tersebut masih *running* di tahun 2018. Sehingga pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta pada *Republika Online* merupakan *main topics* dan selalu dikawal prosesnya melalui pemberitaan yang masif (secara kuantitas).

*Republika Online* mengaku memiliki segmen pembacanya sendiri dan tidak takut kehilangan pembaca. Walaupun dalam reklamasi terjadi dikotomi dalam masyarakat, yakni masyarakat yang mendukung atau menolak reklamasi, namun *Republika Online* tetap berusaha memberikan gambaran lengkap mengenai reklamasi. *Editorial policy* dari *Republika Online* antara lain adalah agar masyarakat mengetahui bagaimana proses reklamasi itu terjadi, sehingga tidak ada masyarakat yang saling menjustifikasi bahwa reklamasi itu baik atau buruk.

Bayu Hermawan juga mengatakan bahwa media massa merupakan anjing penjaga (*watchdog*). Anjing penjaga dimaksudkan bahwa media massa memiliki fungsi sebagai pengawas. Reklamasi Teluk Jakarta merupakan suatu fenomena yang perlu diawasi secara mendalam. Berawal dari kebijakan pemerintah melalui pengeluaran izin reklamasi tanpa kajian yang tepat hingga menimbulkan polemik-polemik di masyarakat. Semua dapat diawasi dan diangkat oleh media sehingga masyarakat memiliki *awareness* terhadap peristiwa yang terjadi.

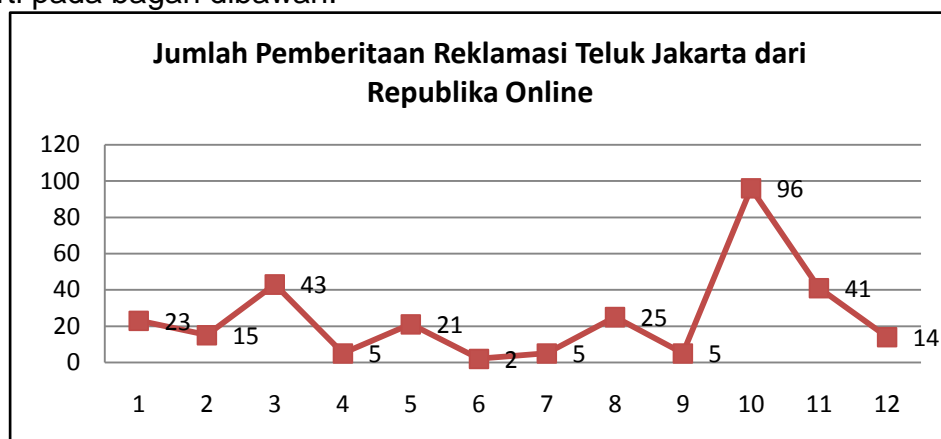
Bayu juga mengatakan bahwa mempertahankan independensi adalah salah satu komponen wajib dalam *editorial policy*. Bagi *Republika Online*, independensi diartikan sebagai bebas dari tekanan pihak manapun dalam melakukan pemberitaan serta menyajikan berita tanpa mengubah sikap politis dari *Republika Online*. Hal tersebut diwujudkan

dengan memberi ruang pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu isu tanpa condong hanya ke satu arah. Pemberitaan dalam hal reklamasi, diusahakan untuk selalu berimbang dengan menampung seluruh informasi dari berbagai belah pihak sehingga tidak memunculkan *tone* yang menolak. Walaupun pada *editorial policy* mengatakan bahwa reklamasi bukan lagi sesuai dengan tujuan awalnya, namun *Republika Online* tetap memberikan tempat bagi pemerintah, pendukung reklamasi, bahkan pengusaha untuk beropini dalam pemberitaannya. Selain itu juga Bayu Hermawan mengatakan tidak akan memberikan pemberitaan tanpa ada fakta dan data. Fakta dan data harus selalu dikembangkan barulah kemudian dilanjutkan, tutur Bayu.

#### 4.1.1.2.3 Pemberitaan *Republika Online* mengenai Konflik Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2017

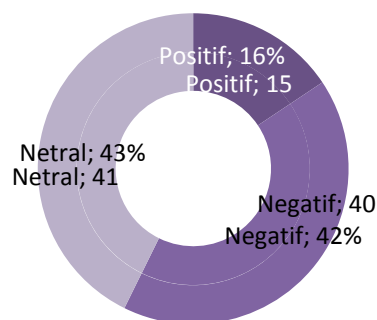
*Republika Online* mengeluarkan 295 (dua ratus sembilan puluh tujuh) berita mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Hal tersebut dikarenakan reklamasi merupakan fokus utama dari *Republika Online* yang mana tujuan memberitakan reklamasi adalah untuk menegaskan tujuan reklamasi dan peruntukannya. Posisi *Republika Online* adalah mengawal proses reklamasi agar tidak merugikan masyarakat.

Jumlah pemberitaan *Republika Online* dapat dilihat melalui rincian seperti pada bagan dibawah.



**Bagan 4.5 Jumlah Pemberitaan *Republika Online* tahun 2017 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta**

Berita yang dikeluarkan *Republika Online* mengenai reklamasi Teluk Jakarta mengalami fluktuasi yang sangat timpang. Hal tersebut dikarenakan pada bulan Oktober, *Republika Online* mengeluarkan 96 berita atau sekitar 33% (1/3 pemberitaan di tahun 2017) guna mengawal reklamasi pasca pelantikan Anies-Sandi sebagai Pemimpin DKI Jakarta. Pemberitaan di bulan Oktober dapat dikatakan merajai secara kuantitas yakni *traffic* tertinggi ada pada bulan Oktober dan bulain lainnya di tahun 2017 tidak ada yang menyamai kuantitas di bulan Oktober. Sehingga sama dengan *ANTARA News*, Oktober dijadikan sebagai fokus untuk analisis konten pemberitaan. Bayu Hermawan mengatakan sebelumnya bahwa *tone* pemberitaan dari *Republika Online* tidak selalu menolak reklamasi, hal tersebut apabila dilihat melalui analisis yang sama dilakukan terhadap *ANTARA News* (lihat Bagan 4.2) sebelumnya maka dapat dilihat melalui diagram berikut:



**Bagan 4.6 Tone Pemberitaan Republika Online tahun 2017 mengenai Reklamasi Teluk Jakarta**

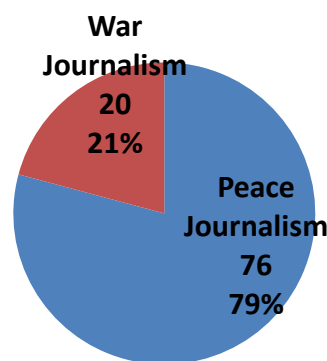
*Tone* Pemberitaan *Republika Online*<sup>64</sup> lebih didominasi oleh pemberitaan netral dengan 43% atau 41 (empat puluh satu) berita, namun berbeda sangat tipis dengan *tone* pemberitaan negatif yakni berjumlah 40 (empat puluh) berita atau 42% pemberitaan. Sementara posisi pemberitaan dengan *tone* positif hanya berjumlah 15 (lima belas) berita atau 16%.

<sup>64</sup> Data analisis *tone* berita *Republika Online* mengenai Reklamasi Teluk Jakarta, Oktober 2017 terlampir pada Lampiran hlm. 4-1

Pemberitaan *Republika Online* dalam penelitian ini juga dianalisis menggunakan indikator *war and peace journalism* oleh Johan Galtung dan juga sama dengan metode yang digunakan pada penelitian terdahulu milik Nicole Yang Lai Fong. Berikut diagram hasil analisis konten berita:

**War and Peace Journalism dalam Republika Online**

Oktober 2017

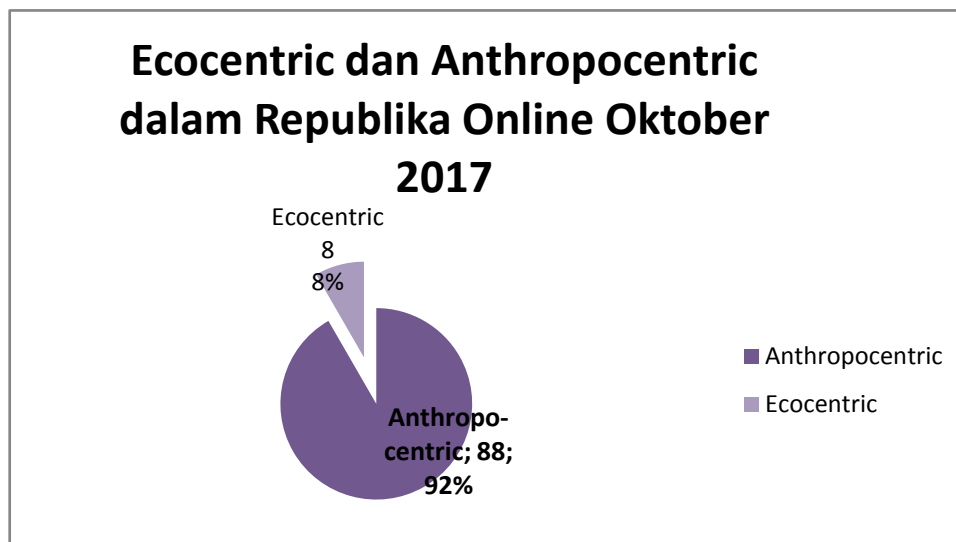


**Bagan 4.7 War and Peace Journalism dalam Republika Online mengenai Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017**

Berdasarkan hasil analisis konten yang dilakukan mengenai *war and peace journalism* pada *Republika Online*<sup>65</sup>terdapat 76 (tujuh puluh enam) berita yang bersifat *peace journalism* atau sekitar 79% pemberitaan. Sementara masih ada pemberitaan yang bersifat *war journalism* yakni sebanyak 20 (dua puluh) berita atau sekitar 21% dari keseluruhan pemberitaan.

Analisis isi berita menggunakan *Green Theory* guna mengetahui sifat pemberitaan *ecocentric* yang berfokus pada unsur lingkungan hidup atau *anthropocentric* yang berfokus pada kepentingan dan kebutuhan manusia. Berikut merupakan hasil analisis berita dalam kerangka *ecocentric* dan *anthropocentric*:

<sup>65</sup> Data analisis klasifikasi *war and peace journalism* berita *Republika Online* mengenai Reklamasi Teluk Jakarta, Oktober 2017 terlampir pada Lampiran hlm. 4-64



**Bagan 4.8 Persentase Pemberitaan Republika Online dalam kerangka ecocentric dan anthropocentric**

Berdasarkan analisis konten yang dilakukan dalam kerangka *ecocentric* dan *anthropocentric*<sup>66</sup> terdapat sedikit sekali berita mengenai lingkungan yakni hanya 8% atau 8 berita dari jumlah keseluruhan berita yang mencapai 96 berita. Sementara pemberitaan yang bersifat *anthropocentric* yang lebih didominasi oleh kepentingan ekonomi, sosial dan politik mencapai 88 (delapan puluh delapan) berita atau 92% pemberitaan.

#### **4.1.2 Pandanganserta Upaya Media Daring dan Lembaga mengenai Keamanan Nasional**

Menurut penelitian *Trust Barometer* dari Edelman<sup>67</sup>, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang cenderung percaya kepada media. Hal tersebut terbukti pada tahun 2017, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media sekitar 67% dan meningkat disaat mayoritas

<sup>66</sup> Data analisis *ecocentric* dan *anthropocentric* berita ANTARA News mengenai Reklamasi Teluk Jakarta, Oktober 2017 terlampir pada Lampiran hlm. 4-31

<sup>67</sup> Berdasarkan hasil penelitian dari *Edelman Trust Barometer* yakni Indonesia masuk dalam 5 (lima) negara yang tingkat kepercayaan terhadap media tinggi yakni 67%, data tersebut merupakan kepercayaan terhadap media online dan sampel berupa masyarakat terinformasi (*public informed*). Data *Edelman Trust Barometer*. 2017 Executive Summary, hlm. 2-4.

negara lain mengalami penurunan. Selain itu budaya yang tidak melakukan *cross check* terlebih dahulu terhadap sebuah pemberitaan juga menjadikan media sangat dipercaya oleh masyarakat.

#### **4.1.2.1 Perspektif Institusi dalam Melihat Media Daring dan Keamanan Nasional**

Berbagai perspektif mengenai media dapat dijelaskan melalui pandangan pemerintah dan institusi wartawan serta media daring yang digunakan sebagai lokus utama yang memiliki peran terhadap reklamasi Teluk Jakarta baik langsung maupun tidak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan berbagai narasumber:

##### **a. Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta**

Narasumber dari Dikominfhumas DKI Jakarta adalah Bapak Syali Gestanon selaku Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Media saat ini pasti berhubungan dengan politik dan dapat dilihat melalui *agenda setting* dan *framing* pemberitaan yang dikeluarkan. Namun pada umumnya media masih menyajikan pemberitaan yang *cover both sides* yakni memadukan berbagai pihak yang berkepentingan ataupun berkompetisi dalam pemberitaannya. Banyak juga media-media baru terutama media daring baru yang masih mencari *hit* dengan memberikan *headline* sensasional pada berita. Media daring bagi Humas Pemprov DKI Jakarta memiliki peran yakni sebagai *early warning* serta sebagai patokan dalam menentukan *trending topics* yang akan diangkat dalam Rapat Pimpinan ataupun Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas). Hal tersebut dikarenakan media daring mampu menyajikan berita secara *real time* dengan kecepatan yang tinggi.

Pemerintah juga memanfaatkan teknologi dengan memiliki media daring berupa portal berita yang ditujukan untuk memberi informasi pada masyarakat atas upaya-upaya yang telah dilakukan

pemerintah, sebagai contoh Pemprov DKI Jakarta memiliki *beritajakarta.go.id*. Keberadaan portal berita daring tersebut juga digunakan sebagai penyebaran informasi mengenai *press release* yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Upaya Pemprov dalam menenangkan publik ketika ada polemik reklamasi Teluk Jakarta terlebih dahulu dijelaskan Syali bahwa DKI Jakarta merupakan mini Indonesia yang mana jika ada suatu isu muncul di DKI Jakarta maka gaungnya besar dan akan menjadi isu nasional. Sehingga manajemen krisis sangat diperlukan DKI Jakarta. Dinkominfohumas DKI Jakarta memiliki beberapa strategi yakni selain melakukan *press release* untuk mengklarifikasi atau menanggapi isu tertentu, juga membuat sebuah forum daring yang diberi nama *frequently answer question* (FAQ) untuk menjawab pertanyaan baik dari publik maupun dari media yang dapat diakses melalui website dan juga aplikasi di ponsel pintar. Selain itu Pemprov DKI juga memberikan layanan pengaduan langsung di Balai Kota jika ada informasi atau keluhan yang ingin dicari tahu atau diutarakan pada Pemprov DKI Jakarta sehingga akses informasi dari dan kepada Pemprov DKI dikatakan mudah.

Kemudahan akses informasi tersebut tidak berpengaruh terhadap pemberitaan mengenai reklamasi dan juga kepentingan politik dibaliknya yang masih merupakan suatu hal sensitif untuk dibahas di Balai Kota. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta yang semenjak ada pergantian di tahun 2017, reklamasi menjadi sebuah persoalan di birokrasi antara keduanya. Terkadang bidang kehumasan sendiri juga dalam memperoleh informasi mengenai reklamasi masih dikalahkan oleh media daring dikarenakan media daring memiliki *speed* yang sangat tinggi. Namun terkadang media daring

memainkan sisi psikologis pembaca melalui headline yang sensasional.

Menurut Syali, pemberitaan media daring untuk menunjang keamanan nasional diperlukan. Media daring memiliki banyak informasi dalam *database* yang seharusnya dilindungi serta tidak menjadikan teknologi informasi menjadi pusat penurunan mental generasi muda dengan konten yang tidak baik. Informasi dari media daring juga dapat menjadi *early warning* akan suatu kasus tertentu yang dapat membahayakan negara. Kemudian dari sisi pemerintah diperlukan *sharing* informasi antar institusi sebagai *early warning* atau pencegahan terhadap keamanan nasional.

#### **b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**

Heny Agustina selaku narasumber merupakan Kasubdit Inventarisasi dan Status Mutu KLHK mengatakan bahwa pemberitaan media daring seringkali mengemukakan fakta lingkungan secara apa adanya. Media daring milik instansi dan juga milik perusahaan berbeda. Media daring yang dimiliki perusahaan seringkali melakukan kritik pada lawan dalam kontestasi politik, sementara media milik instansi, milik KLHK contohnya lebih berperan untuk memberitakan upaya-upaya yang telah dilakukan KLHK dalam pencegahan kerusakan maupun pengelolaan lingkungan. *ANTARA News* menurut Heny melakukan pemberitaan dengan fakta apa adanya dan dengan penggunaan bahasa yang santun, sementara disisi lain terdapat pemberitaan *Republika Online* yang tidak menggunakan fakta lingkungan terkini mengenai reklamasi, semisal rusaknya kondisi Teluk Jakarta. Padahal kerusakan Teluk Jakarta sudah dialami sebelum reklamasi dilakukan. Kerusakan tersebut antara lain adalah matinya terumbu karang serta terkontaminasinya air laut di Teluk Jakarta yang berdasarkan kajian KLHK merupakan akibat dari maraknya

pengambilan ikan dengan menggunakan bom dan juga dengan penggunaan sianida. Fakta lain dari lingkungan di Teluk Jakarta adalah sebenarnya biota laut dapat melakukan *self purification* yakni pemulihan diri apabila lingkungan habitatnya tidak lagi tercemar, namun dengan adanya kegiatan reklamasi sehingga banyak aktivitas yang mengganggu di Teluk Jakarta maka proses tersebut bisa jadi tidak dapat dilakukan.

Media daring seharusnya memberitakan hal-hal yang lebih krusial dibanding polemik reklamasi, yakni solusi untuk perbaikan lingkungan, antara lain mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di titik-titik krusial. Kemudian media daring, juga termasuk *ANTARA News* dan *Republika Online* memberitakan jalannya reklamasi merupakan wujud dari NCICD, padahal reklamasi merupakan proyek lintas NCICD, jadi tanpa reklamasi proyek tersebut masih ada dan reklamasi juga bisa dihentikan tanpa mempengaruhi kebijakan NCICD.

Menurut KLHK, data lingkungan sering kali *misleading*, seharusnya media daring melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada pemilik kajian lingkungan yakni KLHK dan Pemerintah Daerah. Namun media daring juga berguna untuk menjangkau permasalahan lingkungan yang tidak terjangkau sebelumnya oleh KLHK dan Pemerintah Daerah.

Keamanan nasional bagi KLHK merupakan ketiadaan ancaman teror biologi dan polusi di Indonesia. Media daring juga mampu sebagai *watchdog* dalam permasalahan lingkungan. Banyak sekali ancaman yang tidak diberitakan media seperti adanya wacana impor kapal bekas yang dimungkinkan didalamnya terdapat sampah B3, tumpahan minyak yang selalu ada di sekitar Kepulauan Riau serta yang dulu sempat marak seperti impor kondom bekas yang masih ada isinya, itu semua teror

biologi dan polusi namun tidak terlalu diperhatikan oleh media dan lebih fokus pada kontestasi politik, begitupula pemberitaan lingkungan yang diberitakan juga dipengaruhi oleh kontestasi politik. Sehingga untuk mewujudkan keamanan nasional, perlu adanya sinergi yang lebih antar lembaga pemerintah dapat dilihat pada kasus reklamasi yang memperlihatkan bahwa ada ketidaksinergisan antar lembaga pemerintah serta diperlukan peran media sebagai *watchdog* untuk mempersepsikan ancaman terhadap keamanan nasional pada kasus-kasus lingkungan.

### c. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Bapak Agus Sudibyo selaku narasumber merupakan Direktur Riset dan Komunikasi Publik PWI menyatakan bahwa di era demokrasi pers tidak lagi sendirian dikarenakan meluasnya media daring hingga media sosial yang menyebabkan masyarakat memiliki pilihan untuk mengakses informasi. Tidak ada satu unsur yang dapat mengontrol pers dikarenakan prinsip demokrasi. Satu-satunya pedoman agar wartawan memberikan kebenaran informasi adalah dengan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh lembaga afiliasi wartawan tersebut. Literasi masyarakat Indonesia menurut Agus Sudibyo berdasar riset yang dilakukan PWI sudah bagus namun kemampuan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut tergolong lemah sehingga *hoax* mudah untuk dipercaya.

Media daring saat ini tidak ada bedanya dengan media konvensional secara prinsip dan penerapan kode etik, karena sama-sama menggunakan wartawan dalam mencari informasi dan memberitakan. Keluhan terhadap wartawan juga ada yakni antara lain wartawan tidak melakukan konfirmasi atas wawancara, judul berita tidak sesuai dengan isi, judul berita terlalu menghakimi, wartawan media daring bertindak seperti media sosial yakni

menyebarkan *hoax* dikarenakan saat ini semua orang dapat menulis berita atau artikel yang dengan mudah di-*publish* secara *online* namun tidak mengerti kaidah sebagai wartawan yang benar.

Fenomena Reklamasi Teluk Jakarta juga merupakan suatu isu yang besar namun sensitif sehingga wartawan juga pasti menemui kesulitan-kesulitan tertentu dalam mengakses informasi, misalnya terlalu banyak pihak yang harus dimintai keterangan, apabila wartawan tidak dibekali pedoman yang tepat maka akan ikut berkubu-kubu, serta media seringkali ditunggangi kepentingan untuk memuluskan suatu rencana tertentu.

Keamanan nasional dapat diwujudkan dengan seluruh pihak dalam demokrasi (media, pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat) berjalan dengan baik sesuai fungsinya. PWI dapat mewujudkan keamanan nasional melalui pembelaan terhadap hak wartawan atas independensinya yang seringkali terkekang oleh media yang berpihak. Selain itu untuk mendukung keamanan nasional, juga perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk memberantas *hoax* dengan membudayakan verifikasi informasi.

#### **d. Kesbangpol DKI Jakarta**

Teluk Jakarta merupakan kawasan strategis yakni berperan sebagai pintu gerbang masuk ke ibukota. Bapak Habib Setiawan selaku Ketua Bidang Kewaspadaan Dini DKI Jakarta mengatakan bahwa banyak sekali fenomena yang terjadi di Teluk Jakarta. Berdasarkan pengalaman beliau selama 7 (tujuh) tahun bekerja di Pulau Seribu dan berdomisili di Jakarta Timur, beliau memaparkan bahwa setiap hari ada kapal dengan bendera asing yang menyedot pasir-pasir di Teluk Jakarta. Untuk memasuki kapal asing tersebut tidak dapat dilakukan tanpa izin tertentu. Ketika Pemerintah Provinsi melakukan sidak terhadap kapal asing ditemukan fakta

bahwa tidak ada satu pekerja pun yang mampu berbahasa Indonesia maupun Inggris. Disisi lain terdapat pulau-pulau yang baru dibangun yakni Pulau Reklamasi yang juga tidak mengizinkan masyarakat maupun media untuk mendekat ke pulau. Pulau dijaga oleh keamanan swasta dan akan menghalangi siapapun yang akan memasuki pulau reklamasi. Apabila dibiarkan maka lambat laun Teluk Jakarta akan menjadi daerah yang eksklusif. Hal tersebut membahayakan keamanan nasional dikarenakan memiliki potensi konflik yang tinggi serta tidak mampunya negara untuk memberikan keamanan menyeluruh dikarenakan daerah eksklusif dijaga oleh keamanan swasta.

Media memiliki peran sebagai *social control* terhadap fenomena tersebut. Media berhak melakukan kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Fakta lingkungan yang diberitakan media mengenai reklamasi cenderung menipu, senyatanya reklamasi akan menghadirkan sampah-sampah baru bagi lautan sehingga seharusnya media mampu melakukan edukasi lingkungan bagi masyarakat.

Kondisi terbelahnya masyarakat DKI Jakarta juga dikarenakan media terafiliasi pada kepentingan politik, yang menyebabkan masyarakat pesisir ada yang bersifat pragmatis dan militan dalam memandang reklamasi. Masyarakat bukan satu-satunya yang terbelah dalam polemik reklamasi, melainkan juga pemerintah/birokrasi yang juga terbelah akibat polemik reklamasi. Sehingga Kesbangpol harus bekerja keras untuk meredam polemik tersebut agar tidak terjadi konflik yang lebih besar. Keberadaan media sebenarnya dapat membantu kinerja Kesbangpol yakni dengan mengedepankan profesionalitas media yang tidak memihak, tidak provokatif serta tidak memanipulasi data. Diperlukan sinergitas lembaga dan juga media dalam menciptakan

kondisi kerukunan di DKI Jakarta dikarenakan apabila muncul suatu isu kecil yang diberitakan media, maka resonansinya bisa mencapai nasional bahkan internasional akibat DKI Jakarta adalah lokasi strategis yang berperan sebagai ibukota, pusat ekonomi, sekaligus pusat pemerintahan Republik Indonesia.

**e. ANTARA News**

Peran media daring yang berhubungan dengan pemerintah antara lain sebagai penyuar masyarakat yang menginginkan adanya suatu kebijakan. Walaupun persoalan regulasi di Jakarta cukup pelik, namun media harus tetap menyuarakan masyarakat atas kebutuhan regulasi kepada pemerintah.

Keamanan nasional bagi *ANTARA News* bukan hanya dalam perspektif militer, namun dalam aspek ekonomi, sosial, juga budaya. Keamanan nasional dapat diwujudkan melalui pembinaan terhadap pers yang mencerahkan, mendidik, memberdayakan serta setia pada Republik Indonesia dikarenakan masih ada berbagai permasalahan pers yakni masalah kompetensi dari jurnalis, media yang belum memiliki konstruksi pemberitaan yang benar dikarenakan tidak memiliki basis jurnalis yang benar atau inkompeten. Selain itu, upaya dari *ANTARA News* adalah menempatkan jurnalis-jurnalis di pulau terluar sebagai informan mengenai adanya intrusi budaya dan ekonomi yang terjadi di perbatasan.

**f. Republika Online**

Bagi *Republika Online* media merupakan *watchdog* atau anjing penjaga yang mengawasi suatu fenomena dengan menyoroatnya melalui pemberitaan sehingga berdampak pada sikap atau tindakan yang akan dilakukan pemerintah yakni mengeluarkan kebijakan. Ketika suatu fenomena/isu di-*blow up* oleh media, maka

apabila pemerintah tidak menggubris, menegaskan sikap ataupun mengganti posisinya, maka citra pemerintah akan hancur, apalagi ketika media mampu memberikan fakta dan data pendukung mengenai isu tersebut.

Sementara keamanan nasional menurut *Republika Online* adalah keamanan informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi yang masuk. Seharusnya arus informasi tidak mengganggu kehidupan berbangsa dan tidak menyebabkan meningkatnya potensi konflik atau memperkeruh konflik. Menurut *Republika Online* keamanan nasional bukan hanya terorisme dan *proxy war* melainkan keamanan persebaran informasi. Upaya yang telah dilakukan *Republika Online* untuk menjaga keamanan nasional antara lain dengan melakukan filter berita atau filter informasi sebelum dinaikkan menjadi sebuah berita daring. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui dampak apa yang akan terjadi jika berita tersebut naik dan tersebar di masyarakat.

Tabel berikut berfungsi untuk mempermudah pemahaman dari hasil wawancara instansi terkait berupa pemetaan peran media daring dan keamanan nasional:

Instansi	Persepsi Ancaman	Upaya yang seharusnya dilakukan media
Dinkominfohumas DKI Jakarta	Ancaman informasi; kerentanan data informasi di Indonesia	Media bekerjasama dengan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat, serta <i>sharing informasi</i> pada internal lembaga pemerintah.
KLHK	Ancaman lingkungan; teror biologi dan polusi.	Menjadi <i>watchdog</i> bagi fenomena lingkungan sebagai unsur yang membantu memberikan informasi atas lingkungan










		yang belum dijangka pemerintah.
PWI	Ancaman informasi; penyebaran hoax dan budaya masyarakat yang tidak melakukan verifikasi informasi.	Media dan seluruh unsur demokrasi harus berjalan sesuai fungsinya dan edukasi kepada masyarakat.
Kesbangpol DKI Jakarta	Ancaman <i>non militer</i> ; daerah eksklusif, ancaman lingkungan dan potensi konflik.	Menjadi <i>social control</i> yang mengkritik secara konstruktif serta memberikan fakta yang ada agar persepsi ancaman terbangun.
<i>ANTARA News</i>	Ancaman non militer; ekonomi, sosial, budaya	Media 3E+1
<i>Republika Online</i>	Ancaman informasi; seharusnya informasi tidak memecah belah bangsa.	Media sebagai <i>watchdog</i> , menyoroti fenomena hingga kebijakan

Tabel 4.1 Pemetaan Persepsi Ancaman terhadap Keamanan Nasional

#### 4.1.2.2 Upaya *ANTARA News* dan *Republika Online* terhadap Penyelesaian Konflik Reklamasi Teluk Jakarta melalui Pemberitaan pada Oktober 2017

Pada bulan Oktober 2017, terdapat 14 (empat belas) pemberitaan *ANTARA News* dan juga 96 (sembilan puluh enam) pemberitaan *Republika Online* mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Diantara pemberitaan tersebut dapat dilihat adanya narasumber-narasumber kunci (memiliki kewenangan strategis dalam reklamasi) yang memiliki ide atau gagasan yang berbeda terhadap konflik atas polemik reklamasi Teluk Jakarta.

Pemberitaan kedua media daring tersebut pada bulan Oktober 2017 dapat dilihat secara garis besar melalui cuplikan *headline* pemberitaan berikut:

<p><b>Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan</b></p>  <p>Republika, 08 Oct 2017</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan, reklamasi Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang. Kata dia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).</p>	<p><b>Anies-Sandi Tetap Tolak Reklamasi</b></p>  <p>Republika, 07 Oct 2017</p> <p>Tim sinkronisasi pasangan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyatakan tak akan mengubah sikap terkait reklamasi Teluk Jakarta. Sampai saat ini, gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih itu tetap menolak kelanjutan reklamasi oleh pihak swasta.</p>	<p><b>JK: Proyek Reklamasi Jakarta yang Sudah Berjalan Dilanjutkan</b></p>  <p>Republika, 31 Oct 2017</p> <p>Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah menegaskan akan melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta yang sudah berjalan atau eksisting. Sebab, apabila dibongkar maka akan memakan ongkos yang lebih besar.</p> <p>Dalam pertemuan yang sudah Pemerintah "Saya sudah menguntur Diketahui, adminstra memenuhi mengenai Atas dasar Menteri Kd 001/02/2017 yang dikelk menghent Dalam kuiti pembangu</p>
<p><b>Anies: Janji Menolak Reklamasi tak Berubah</b></p>  <p>Republika, 10 Oct 2017</p> <p>Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan menegaskan tak akan mengingkari janji semasa kampanye Pilkada DKI 2017. Salah satu janji yang ditegaskan Anies adalah menolak reklamasi di Teluk Jakarta.</p>	<p><b>JK: Reklamasi Pulau Baru tidak Dilanjutkan</b></p>  <p>Republika, 01 Nov 2017</p> <p>Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menegaskan reklamasi Teluk Jakarta untuk pulau-pulau baru tidak akan dilanjutkan. Namun, untuk reklamasi yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan. Menurut Kalla, membongkar reklamasi yang sudah berjalan dapat memakan ongkos yang lebih besar dibandingkan membangunnya.</p>	<p><b>Luhut Cabut Moratorium Reklamasi, Djarot: Terima Kasih</b></p>  <p>Republika, 06 Oct 2017</p> <p>Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bergembira dengan pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta. Ia menyatakan terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas beleggu saat keputusan Menteri Koordinator Maritim sebelumnya. "Saya terima kasih, memang sudah sehabisnya (moratorium) dicabut," kata dia di Balai Kota, Jumat (6/10).</p> <p>wali kota BIR 1995 dan be reklamasi, m hanus mengg (moratorium) kepada dewa Sebelumnya, Jakarta Tuty H moratorium n ditanatetanga malam. "Pren Alhamdulillah 17 pulau," kat Menteri Kooi sudah mencal pulau reklamu keputusan ter "Nggak ada (h tetap dilanjut</p>
	<p><b>Rencana kelanjutan reklamasi seharusnya hormati janji Gubernur DKI Jakarta terpilih</b></p>  <p>Selasa, 10 Oktober 2017 (8 01 WIB)</p> <p>Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan (ANTARA) - Rencana terkait kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta seharusnya menghormati janji yang telah diucapkan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan yang menginginkan untuk menghentikan aktivitas yang bisa merusak lingkungan tersebut.</p>	<p><b>Wapres: pemerintah selesaikan reklamasi yang sedang dibangun</b></p>  <p>Selasa, 31 Oktober 2017 16:30 WIB</p> <p>Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Siprianto)</p> <p>Yang kita bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada, 'kan tidak mungkin dibongkar, 'kan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya</p>

**Gambar 4.1** Cuplikan beberapa *Headline* ANTARA News dan *Republika Online* Oktober 2017 (Sumber: *antaranews.com* dan *republika.co.id*)

Berdasarkan cuplikan *headline* di atas terlihat bahwa Menkomaritim, Luhut Binsar Panjaitan merupakan pihak pendukung reklamasi dan juga yang melakukan pencabutan moratorium reklamasi pada 5 Oktober 2017.<sup>68</sup> Dalam beberapa pemberitaan yang menayangkan Luhut juga biasanya disertai oleh Ridawan Djamaluddin yang merupakan anggota Kemenkomaritim juga. Dapat dilihat melalui tabel analisis pemberitaan berikut:

<sup>68</sup>Terdapat dalam Lampiran

Judul	Narasumber	Institusi	Pernyataan
<p>Moratorium dicabut, reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan</p> <p>(ANTARA News, 5 Oktober 2017)</p>	<p>Luhut Binsar Panjaitan</p>	<p>Menkomaritim</p>	<p>memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.</p> <p>"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),"</p>
<p>Luhut: Anies Harus Terima Pencabutan Moratorium Reklamasi</p> <p>(Republika Online, 6 Oktober 2017)</p>	<p>Luhut Binsar Panjaitan</p>	<p>Menkomaritim</p>	<p>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui, sudah mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Dia meminta semua pihak untuk menerima keputusan tersebut.</p> <p>Luhut pun menegaskan, Pemprov DKI Jakarta harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu.</p> <p>"Haruslah. Kalau dia (, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau," kata Luhut.</p> <p>"Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan, ketua Alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi</p>

			mau apa lagi?" ujar dia.
--	--	--	--------------------------

**Tabel 4.2 Pernyataan Luhut Mendukung Reklamasi**

Disisi lain ada kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memiliki janji kampanye menolak reklamasi.<sup>69</sup>Berikut pernyataan Anies dalam pemberitaan:

Judul	Narasumber	Institusi	Pernyataan
Anies: Substansi Pemimpin Menepati Janji Kampanye (Republika Online, 13 Oktober 2017)	Anies Baswedan	Gubernur DKI Jakarta	Anies berjanji, menghentikan proyek yang telah dicanangkan sejak era Presiden ke-2 RI Suharto itu. Alasannya adalah pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta. Terbaru, suara penolakan kembali dilontarkan Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/10). "Lho kok ditanya? Anda lihat program kita, ada yang berubah nggak di program?" ujarnya.

**Tabel 4.3 Pernyataan Anies Baswedan Menolak Reklamasi**

Selain mendukung dan menolak reklamasi, juga terdapat pernyataan narasumber strategis yang berorientasi pada penengahan isu reklamasi, yakni Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Berikut pernyataan Jusuf Kalla:

Judul	Narasumber	Institusi	Pernyataan
Wapres: Pemerintah selesaikan reklamasi yang sedang dibangun (ANTARA News, 31 Oktober 2017)	Jusuf Kalla	Wakil Presiden RI	"Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu," "Yang kita bicarakan sebenarnya yang <i>existing</i> , yang sudah ada, kan tidak mungkin dibongkar, kan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya,"

<sup>69</sup>Terdapat dalam Lampiran

			<p>"Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah,"</p> <p>"Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang, bagaimana bongkar ulangnya? kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai kan ada yang memelihara,"</p>
JK: Reklamasi Sudah Dijalankan Maka Harus Diteruskan (Republika Online, 31 Oktober 2017)	Jusuf Kalla	Wakil Presiden RI	<p>"Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu," kata JK</p> <p>"Yang kita bicarakan sebenarnya yang 'existing', yang sudah ada, 'kan tidak mungkin dibongkar, 'kan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya," tuturnya.</p> <p>"Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah," ujarnya.</p> <p>"Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang, bagaimana bongkar ulangnya? kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai 'kan ada yang memelihara," imbuhnya.</p>

**Tabel 4.4 Pernyataan Penengah/Saran dari Jusuf Kalla terhadap Reklamasi Teluk Jakarta**

*ANTARA News* dan *Republika Online* dalam pemberitaannya telah mengambil narasumber strategis pemangku kebijakan dengan pernyataan yang berbeda walau ketiganya sama-sama berasal dari unsur pemerintah.

Temuan ini dikerucutkan hanya atas pernyataan pemangku kebijakan dikarenakan narasumber memiliki posisi yang strategis untuk membawa ke arah mana kebijakan reklamasi dibawa.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Agenda Setting ANTARA News dan *Republika Online* dalam Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta 2017**

#### **4.2.1.1 Media Agenda**

##### **4.2.1.1.1 Editorial Policy dalam Media Agenda**

Kedua media yakni *ANTARA News* dan *Republika Online* menerapkan hal yang sama terhadap penyusunan *editorial policy* atau kebijakan editorial. *Editorial Policy* dibentuk oleh *Central Desk* yakni Pemimpin Redaksi serta Redaktur Pelaksana (pada *Republika Online* ditambahkan Asisten Redaktur Pelaksana) sebagai pedoman bagi seluruh elemen pemberitaan (redaktur, editor hingga reporter) dalam menyusun sebuah berita. *Editorial Policy* merupakan turunan dari visi dan misi media agar pemberitaan yang dikeluarkan tidak keluar dari jalur ataupun fokus media tersebut berdasar visi dan misinya.

*Editorial Policy* dari kedua media memang berbeda walau tujuan akhir keduanya adalah sama-sama ingin mendidik masyarakat melalui berita yang dikeluarkan. *ANTARA News* fokus pada turunan dari visi dan misinya, terutama mengedepankan aspek 3E+1N (*Educating, Enlightening, Empowering, dan Nasionalisme*) yang sasarannya adalah pembaca dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Aspek nasionalisme juga sangat dipegang teguh oleh *ANTARA News* karena LKBN ANTARA merupakan satu-satunya kantor berita nasional milik Pemerintah Indonesia harus mampu memberi contoh jurnalisme yang memperkuat Republik Indonesia, bukan menceraiberaikan bangsa. Selain itu, *ANTARA News* mengaku tidak memiliki tajuk dalam pemberitaan, namun *ANTARA News* beropini dengan memunculkan opini-opini yang ada di masyarakat.

Berbeda dengan *ANTARA News*, *Republika Online* lebih mengedepankan nilai manfaat berita untuk mendidik masyarakat, khususnya Umat Islam karena pada dasarnya *Republika* merupakan media dengan basis pembaca adalah Umat Islam. *Republika Online* memiliki segmen pembaca tersendiri, sehingga pemberitaan *Republika Online* yang kritis ataupun sensitif tidak membuat *Republika Online* takut kehilangan pembaca.

Porsi pemberitaan keduanya juga berbeda, *ANTARA News* memiliki prinsip bahwa pemberitaan harus berimbang secara kuantitas, sehingga perbedaan pendapat yang menyebabkan polemik dapat diredam melalui pemberitaan yang berimbang. Sementara *Republika Online* lebih memiliki prinsip untuk menyuarakan sesuatu yang berpihak pada masyarakat, yakni selama belum menemukan titik terang atas kebermanfaatan suatu fenomena bagi masyarakat maka akan dikawal terus melalui pemberitaan. Hal tersebut terbukti secara kuantitas *Republika Online* mengeluarkan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) berita mengenai reklamasi, dibandingkan *ANTARA News* yang hanya mengeluarkan 66 (enam puluh enam) berita mengenai reklamasi di tahun 2017. Sebenarnya pemberitaan dengan judul reklamasi sangat banyak ditemukan, namun pada penelitian ini dilakukan sortir atas berita yang memang menyentuh langsung pokok persoalan reklamasi.

Perbedaan kuantitas jumlah berita tersebut juga didasari bahwa ada perbedaan pandangan tentang reklamasi. Bagi *Republika Online*, reklamasi merupakan sesuatu yang pada sejarahnya sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan Bayu Hermawan bahwa reklamasi pada tahun 2017 merupakan kajian utama *desk nasional*<sup>70</sup>, sehingga secara kuantitas memang terlihat bahwa *Republika Online* mengawal reklamasi agar hasil yang didapat dari reklamasi menguntungkan masyarakat. Sedangkan bagi *ANTARA News*, reklamasi pada tahun 2017 hanyalah *sub issue* dari Pilkada 2017,

---

<sup>70</sup>Kanal pemberitaan nasional pada *Republika Online*.

sehingga pemberitaan mengenai reklamasi harus berimbang dengan pemberitaan yang dianggap *sub issue* Pilkada lainnya karena fokus utama *ANTARA News* pada tahun 2017 adalah Pilkada DKI Jakarta.

Pada Oktober 2017, kedua media sama-sama mengalami *traffic* tertinggi pemberitaan. Hal tersebut dimungkinkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta memang bukan agenda dari Gubernur terpilih dan justru sebaliknya yakni Gubernur terpilih kontra terhadap reklamasi sehingga berita reklamasi diangkat kembali agar jelas akan dibawa kemana ke depannya.

*Editorial Policy* dari *Republika Online* dalam reklamasi adalah ingin mendudukan reklamasi dari awal tujuannya diadakan. Menurut *Republika Online*, reklamasi pada awalnya dilakukan sebagai bentuk solusi atas kurangnya lahan hunian di Jakarta serta menjadi bentuk penyelamatan lingkungan, namun senyatanya justru menjadikan pulau reklamasi sebagai kawasan elite yang dirasa tidak adil dan makin mendiskriminasi masyarakat menengah kebawah. Hal tersebut juga berdampak pada skala prioritas *Republika Online*, yakni tidak hanya di tahun 2017, namun di tahun 2018 reklamasi masih menjadi *hot issue* yang terus diprioritaskan oleh *Republika Online*. Sementara *ANTARA News* dengan motto 3E+1N lebih mengedepankan porsi keberimbangan berita dengan tujuan agar polemik di masyarakat dapat direduksi dan tidak memecah belah bangsa.

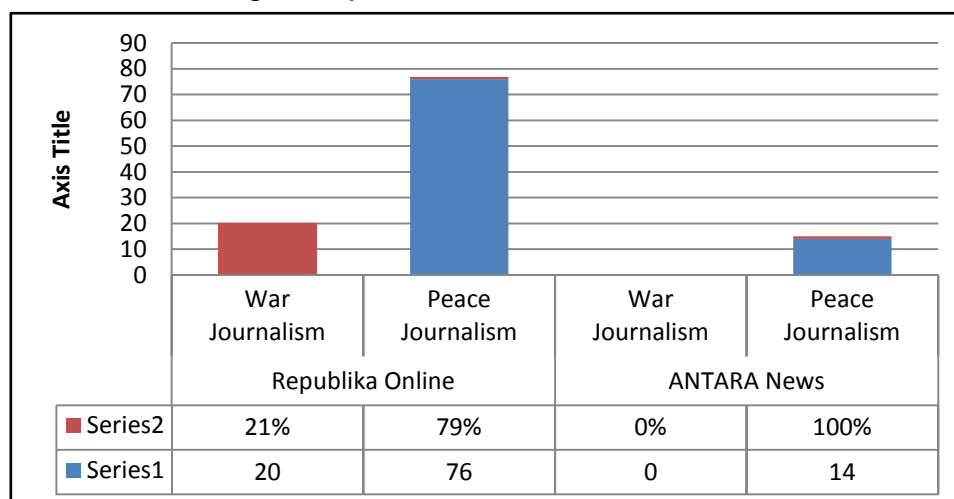
*Editorial policy* sangat berpengaruh kepada tindakan media dalam melakukan pemberitaan begitupula dengan kecenderungannya dalam memberitakan, baik *ANTARA News* maupun *Republika Online* memiliki kecenderungan masing-masing. Penelitian ini menguji kecenderungan kedua media online *portal* berita tersebut melalui 2 (dua) aspek yakni aspek jurnalisme damai atau jurnalisme perang (*war and peace journalism*) serta melalui *Green Theory* yang dapat merumuskan sebuah berita cenderung mengarah pada kebutuhan lingkungan atautkah pada

kebutuhan manusia melalui pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017.

#### 4.2.1.1.2 War and Peace Journalism

Aspek pemberitaan dapat dilihat melalui sisi jurnalisme damai atau perang (dilihat melalui indikator *War and Peace Journalism* menurut Johan Galtung). Berita tergolong *peace* (damai) apabila berorientasi pada damai dengan memaparkan formasi konflik yakni melingkupi semua pihak dalam konflik, baik dari elite (pemerintah dan pengembang) maupun dari pihak yang tidak mampu bersuara (dalam kasus reklamasi antara lain adalah nelayan dan lingkungan), berusaha mencapai tujuan bersama (*win win solution*) serta memaparkan isu yang sebenarnya atau transparansi terhadap fenomena, bersifat proaktif, orientasi terhadap yang termarginalkan, serta solutif terhadap permasalahan. Sementara yang termasuk *war* adalah berita yang reaktif, *zero-sum* atau kemenangan salah satu pihak saja, serta berbagai indikator lainnya pada Tabel 2.2.<sup>71</sup>

Berikut merupakan perbandingan *war and peace journalism* antara ANTARA News dengan *Republika Online*:



**Bagan 4.9 Perbandingan War and Peace Journalism antara ANTARA News dan Republika Online dalam Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Oktober 2017**

<sup>71</sup> Tabel Indikator War and Peace Journalism, hlm. 14

Pemberitaan *ANTARA News* yang berjumlah 14 (empat belas) secara keseluruhan mengarah pada jurnalisme damai atau *peacedan* telah menunjukkan bahwa memang *ANTARA News* berpegang pada nasionalisme yang tidak ingin membuat pembaca tercerai berai. Pemberitaan di *ANTARA News* didominasi oleh sikap yang berusaha netral dalam memberitakan konflik Reklamasi Teluk Jakarta, serta masih memegang kaidah-kaidah *peace journalism*.<sup>72</sup>

Disisi lain, *Republika Online* juga memiliki nilai yang cukup bagus yakni lebih banyak pemberitaan yang bersifat *peace journalism* dibanding dengan *war journalism*. Analisis ini hanya berdasar pada bulan Oktober 2017 yang mana kebijakan pemberitaan memang sangat diharapkan untuk mengawal proses reklamasi ketika ada pergantian Gubernur di DKI Jakarta.

Kaidah *peace journalism* yang dipegang media, mayoritas dikarenakan media masih memberikan penjelasan reklamasi secara mendalam dan menyuarakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan reklamasi, baik mereka yang menerima keuntungan atas hadirnya reklamasi maupun yang justru menerima kerugian atas reklamasi. Sementara masih adanya *war journalism* pada *Republika Online* juga salah satunya dikarenakan adanya narasumber yang menjatuhkan narasumber lainnya atau ditunggangi kepentingan politik.

Kesimpulannya, kedua media sudah baik dalam menerapkan kaidah *peace journalism* karena berusaha menghadirkan informasi secara holistik dan *cover both sides* atas pihak-pihak pendukung dan penolak reklamasi.

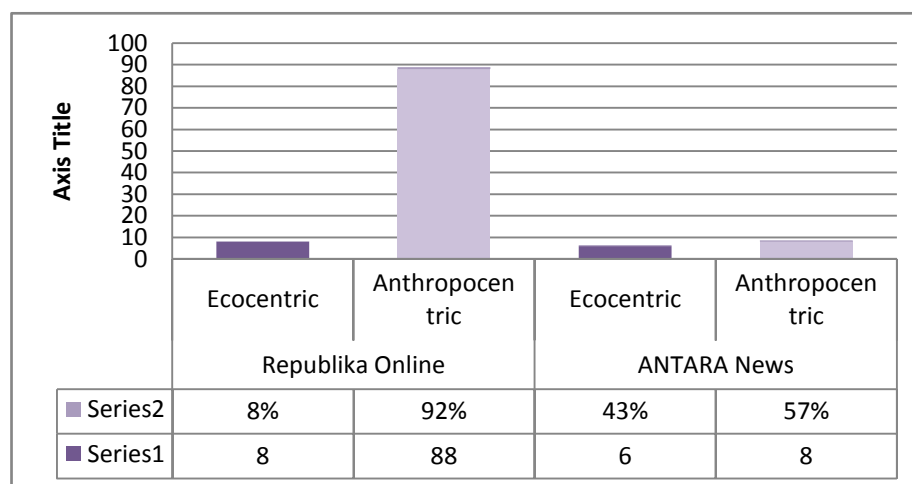
#### **4.2.1.1.3 Green Theory: Ecocentrism dan Anthropocentrism**

Pemberitaan juga dikategorikan sesuai *Green Theory*, yakni antara yang lebih mengedepankan aspek lingkungan (*ecocentric*) ataukah aspek

---

<sup>72</sup> Analisis data berita *ANTARA News* dapat dilihat melalui Lampiran.

manusia (*anthropocentric*). Aspek *ecocentric* yakni mengedepankan hajat hidup lingkungan semisal kerusakan lingkungan, apa yang dibutuhkan lingkungan agar tetap lestari, serta dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi apabila manusia melakukan suatu tindakan masuk dalam pemberitaan, sementara *anthropocentric* lebih pada hajat hidup manusia seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan ruang, dan lain sebagainya.



**Bagan 4.10 Perbandingan *Ecocentric* dan *Anthropocentric***

Pemberitaan keduanya mengenai reklamasi di bulan Oktober 2017 masih didominasi oleh pemberitaan yang berfokus pada kepentingan manusia, seperti persoalan ekonomi reklamasi hingga kasus korupsi. Persoalan mengenai lingkungan masih belum menjadi perhatian utama, namun ketimpangan *Republika Online* jauh lebih besar dibandingkan dengan *ANTARA News* yang masih cukup berimbang. Hal tersebut dikarenakan faktor banyaknya pemberitaan di *Republika Online* sehingga mungkin mempersulit kontrol terhadap berita.

#### 4.2.1.2 Public Agenda

##### 4.2.1.2.1 Fenomena di Masyarakat

Polemik antara pro dan kontra reklamasi terjadi di publik, baik di perdebatan formal maupun informal. Polemik yang berkelanjutan tersebut tidak menemukan titik terang dikarenakan banyaknya diskursus yang

diberikan elite maupun media dalam membentuk opini masyarakat. Sebagai negara dengan tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap media sebanyak 67%<sup>73</sup>, maka media di Indonesia merupakan salah satu unsur kuat yang mampu mengarahkan kemana arah diskursus akan berjalan di masyarakat.

#### **4.2.1.2.2 Sasaran Opini yang Ingin Dibentuk**

Menurut *ANTARA News*, opini yang ingin dibentuk media dalam suatu pemberitaan sederhananya dapat diketahui dengan melihat narasumber yang dipilih dalam pemberitaan. Opini yang ingin dibentuk *ANTARA News* adalah masyarakat mampu menimbang bahwa reklamasi Teluk Jakarta lebih banyak mendatangkan manfaat yang baik atau justru mendatangkan dampak yang buruk, atau dengan kata lain *ANTARA News* ingin masyarakat mengetahui apakah keuntungan dari adanya reklamasi lebih besar atautkah sebaliknya. Sehingga muncul masyarakat yang sesuai dengan agenda 3E+1N yakni masyarakat yang tercerahkan dengan informasi yang memadai.

*Republika Online* menginginkan opini yang terbentuk di masyarakat adalah agar masyarakat tidak mudah dibohongi dan tidak menjustifikasi dampak dari reklamasi, sehingga *Republika Online* memberikan gambaran yang lengkap mengenai reklamasi bukan hanya menyajikan informasi bebas, namun mengedukasi. Masyarakat sudah cukup terombang-ambing oleh polemik yang dihadirkan di media sosial, sehingga media *online* portal berita seharusnya mampu membuat masyarakat memiliki pegangan informasi yang kredibel, akurat dan terpercaya.

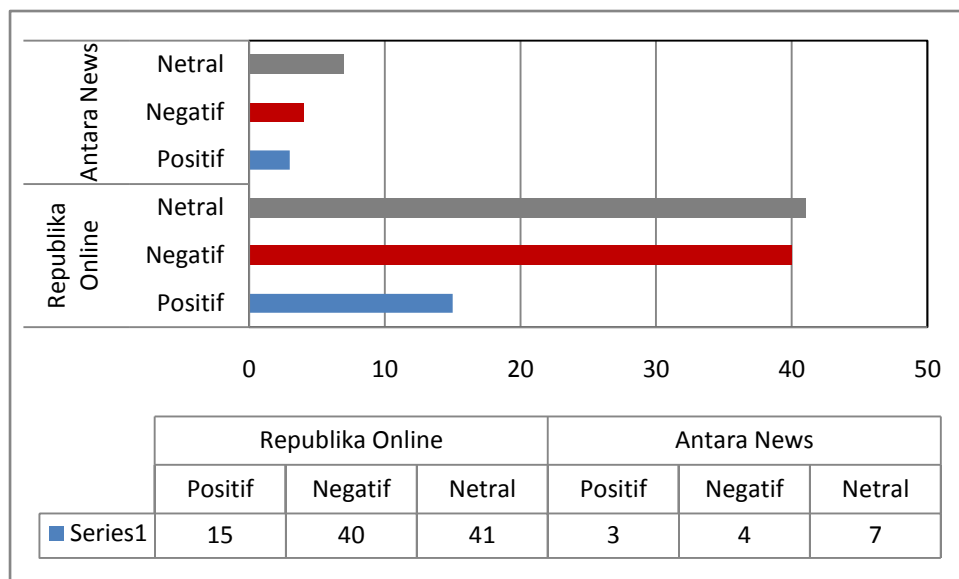
Kedua media sebenarnya memiliki sasaran yang sama yakni menginginkan informasi dan gambaran mengenai reklamasi dapat secara jelas dan detail dikonsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat mampu

---

<sup>73</sup> Op.Cit, hlm. 54

bertahan walau kuatnya polemik yang terjadi, apalagi ada tunggangan kepentingan politik yang memperkeruh arus informasi mengenai reklamasi, serta terbentuk masyarakat yang memiliki *standing point* tertentu dalam reklamasi. Walau sebenarnya, media memiliki *order* atau keinginan pelanggan untuk mendapatkan informasi seperti apa.

Pembentukan sasaran opini publik juga tidak terlepas dari *media agenda*, dari *editorial policy* dan maksud dari menaikkan berita. *Tone* pemberitaan merupakan sarana yang terlihat bagi pembentukan opini publik. Berikut merupakan perbandingan *tone* pemberitaan yang telah diolah pada subbab sebelumnya yang terdiri dari positif, negatif dan netral:



**Bagan 4.11 Perbandingan *Tone* Pemberitaan**

Apabila dilihat melalui *tone* pemberitaan mengenai reklamasi, maka terlihat opini apa yang ingin dibentuk. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kedua media didominasi oleh pemberitaan yang netral, namun apabila dibandingkan dengan pemberitaan yang lain, maka muncul ketimpangan yang cukup besar dari *Republika Online*. Walau netral masih mendominasi nuansa pemberitaan, namun pemberitaan bernada negatif juga masih banyak secara kuantitas dan hanya berselisih 1 (satu) berita dengan berita netral.

Disisi lain *ANTARA News* mencoba cukup berimbang. Hal ini kembali lagi pada *policy* dari *ANTARA News* yakni mengkuantifikasi pemberitaan agar dalam kurun waktu tertentu, pemberitaan dapat selalu berimbang. Berimbang yang dimaksud adalah pemberitaan yang netral ataupun seimbang antara positif dan negatif. Pada bulan Oktober 2017, proses kuantifikasi termasuk berhasil dikarenakan perbandingan yang tidak terlalu berat sebelah dan cenderung netral.

Kesimpulannya adalah bahwa opini yang ingin dibangun media terhadap masyarakat salah satunya terlihat melalui *tone* pemberitaan, walau pada awal tujuan kedua media sama yakni mencerahkan masyarakat, namun cukup terlihat ada keberpihakan pada salah satu media.

#### **4.2.1.3 Policy Agenda**

##### **4.2.1.3.1 Kebijakan yang Telah Ada dan Sasaran Kebijakan yang Diinginkan**

Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta diawali oleh Keppres No. 52 Tahun 1992 pada era Presiden Soeharto. Rencana reklamasi kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 mengenai Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010-2030 dengan pembentukan 14 (empat belas) pulau reklamasi. Kemudian menjadi 17 (tujuh belas) pulau reklamasi melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 yang keduanya ditandatangani oleh Fauzi Bowo.<sup>74</sup> Pada tahun 2015 pengerjaan reklamasi dilakukan, namun pada 19 April 2016, Rizal Ramli mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap reklamasi Teluk Jakarta dan diperkuat dengan penzegelan Pulau C, D, dan G oleh KLHK selama 120 hari pada Mei 2016.

Reklamasi kembali bergejolak ketika Luhut Binsar Panjaitan mencabut moratorium reklamasi pada 5 Oktober 2017. Anies Baswedan

---

<sup>74</sup> Gubernur DKI Jakarta Periode 2007-2012.

selaku Gubernur DKI Jakarta terpilih menarik Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura) pada Desember 2017.

Pemberitaan sangat berpengaruh terhadap regulasi atau kebijakan yang akan ataupun telah dikeluarkan pemerintah. Menurut Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemberitaan merupakan salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam Rapat Pimpinan ataupun Rapat Pimpinan Terbatas di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Porsi keberpengaruhan media dengan regulasi dipengaruhi oleh media *online*, cetak dan juga televisi. Media *online* digunakan sebagai pencarian *trending issue*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengatakan bahwa media merupakan unsur yang penting dalam mengawasi dan mengawal regulasi maupun mendesak pemerintah untuk menerbitkan sebuah regulasi karena media memiliki fungsi sebagai *watch dog* (anjing penjaga).

Hal senada juga disampaikan oleh *Republika Online*, bahwa media merupakan anjing penjaga, yakni ketika ada suatu peristiwa, media akan memberikan sorotan-sorotan pada hal kritis sehingga pemerintah mampu bertindak dengan bijak, selain itu media juga memiliki peran untuk mengawasi agar suatu isu tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan lain selain mensejahterakan masyarakat. *Republika Online* juga menjelaskan ketika ada sesuatu yang di *blow up* oleh media dan pemerintah tidak melakukan apapun yakni tetap pada posisinya maka hal tersebut akan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

*ANTARA News* melalui pemberitaannya juga melakukan kritik terhadap pemerintah, walaupun *stakeholder* media tersebut merupakan pemerintah. Tujuan *ANTARA News* melakukan hal tersebut adalah menjunjung demokrasi. Teguh Priyanto mengatakan bahwa

bagaimanapun *ANTARA News* adalah media yang juga melakukan *check and balance* terhadap pemerintah atas regulasi atau tindakan pemerintah.

Begitupula kebijakan akhir reklamasi juga didapatkan melalui gagasan narasumber pemberitaan media di tahun 2017 yang kemudian diimplementasikan pada tahun 2018 yang lebih lanjut akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

Pada intinya media lebih dahulu dari kebijakan atau kebijakan lebih dahulu dari media merupakan sebuah sudut pandang yang sama-sama memiliki kebenaran, dikarenakan pemerintah yang demokratis sehingga eksistensi media dalam mengawal suatu fenomena dan kebijakan masih diperhatikan pemerintah.

*Agenda Setting* media daring *ANTARA News* dapat dijelaskan bahwa media tersebut berusaha memberikan gambaran bahwa di tahun 2017, pemilukada DKI Jakarta merupakan fokus utama yang disorot untuk diinformasikan sementara reklamasi menjadi *sub issue* dari pemilukada DKI Jakarta yang berusaha untuk disorot secara berimbang melalui kuantitas pemberitaan serta posisi *tone* pemberitaan yang cenderung berimbang. Hal tersebut dikarenakan *editorial policy ANTARA News* yang berusaha mempertahankan 3E+1N nya yang mana pemberitaan tidak boleh memecah belah, sehingga dominansi pemberitaan di bulan Oktober cenderung netral dan berimbang antara *tone* positif dan negatif terhadap reklamasi. Selain itu, *ANTARA News* juga berusaha berimbang dengan mengelola opini dari berbagai pihak dibuktikan dengan pemberitaannya yang berisifat *peace journalism*. Pada sisi lain, *ANTARA News* juga menghadirkan pemberitaan yang berimbang mengenai lingkungan dan manusia. Hal ini adalah upaya yang diturunkan dari *agenda setting ANTARA News* bahwa dari segi manusia maupun lingkungan dari reklamasi harus disorot agar gambaran yang ada di pikiran pembaca dapat menimbang keuntungan dan kerugian reklamasi secara

menyeluruh, tidak hanya untung-rugi bagi manusia, namun juga bagi lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambaran yang ingin dibentuk *ANTARA News* dalam rangka pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta adalah bahwa reklamasi merupakan satu dari banyaknya hal yang digaungkan ketika pemilukada DKI Jakarta yang mana sebagai *main issue* yang disorot oleh *ANTARA News* dikarenakan resonansi/gaung pemberitaan yang tinggi dan bahwa reklamasi sendiri sebenarnya adalah sebuah isu yang dapat mempengaruhi Pemilukada DKI Jakarta sehingga *ANTARA News* berusaha untuk memberikan gambaran yang seimbang dengan harapan bahwa masyarakat mampu bersikap netral terhadap reklamasi dengan tidak menyudutkan atau meninggikan pihak-pihak yang berkontestasi dalam Pemilukada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut juga dikarenakan karena *konsumen* dari *ANTARA* sejatinya adalah media, sehingga *ANTARA News* memang tidak memiliki tajuk tertentu dan berusaha menghadirkan pemberitaan yang berimbang, dibuktikan pada penelitian ini dengan menganalisis pemberitaan *ANTARA News* pada Oktober 2017.

*Republika Online* memiliki *agenda setting* dengan membuat gambaran bahwa reklamasi merupakan isu utama yang harus disorot. Hal tersebut dikarenakan reklamasi dikhawatirkan oleh *Republika Online* akan menjadi kawasan elite yang tidak berpihak pada kelompok rentan (utamanya masyarakat kelas bawah) dan juga lingkungan. Berbeda dengan *ANTARA News*, bahwa *Republika Online* merupakan media yang memiliki segmen pembacanya sendiri yakni utamanya umat Islam yang menjadikan pemberitaan *Republika Online* juga diharuskan menimbang informasi yang diinginkan oleh pembacanya. Selain itu, dari *tone* pemberitaan bulan Oktober 2017 pada isu reklamasi Teluk Jakarta, *Republika Online* berusaha memberikan gambaran pada pembacanya bahwa reklamasi memiliki aspek negatif yang sangat tinggi dengan presentase pemberitaan negatif lebih tinggi daripada positif. Selain itu,

pemberitaan *Republika Online* cenderung *peace journalism* dikarenakan masih memberikan ruang-ruang pada pihak-pihak yang terlibat secara cukup menyeluruh, namun *Republika Online* dirasa lebih menitikberatkan kepentingan manusia dibandingkan dengan kelestarian lingkungan dikarenakan pemberitaan manusia dan lingkungan sangat tidak seimbang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Agenda Setting Republika Online* adalah menyurut reklamasi Teluk Jakarta adalah memberikan gambaran kepada pembacanya yakni mayoritas umat Islam bahwa reklamasi memiliki banyak kerugian bagi masyarakat bawah dan pemerintah harus bertindak untuk menghentikan reklamasi.

#### **4.2.2 Perspektif Keamanan Nasional**

Keamanan nasional merupakan aspek yang sangat penting dan krusial bagi kehidupan bangsa dan negara dikarenakan keamanan nasional merupakan sebuah perspektif baru yang melihat fenomena secara menyeluruh dan melihat ancaman secara lebih komprehensif. Analisis perspektif keamanan nasional dibagi menjadi 2 (dua) yakni mengenai sekuritisasi atau pembentukan ancaman dari fenomena reklamasi dan dialektika Hegel dalam melihat media dalam memberitakan konflik reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017.

##### **4.2.2.1 Sekuritisasi Ancaman dalam Keamanan Nasional melalui Pemberitaan Media Daring**

Sekuritisasi merupakan proses menentukan ancaman yang dikonstruksi secara sosial (*socially constructed*). Peran media massa yang mampu melakukan penggirinan opini atau memberikan gambaran bagi pembacanya, seharusnya mampu dimanfaatkan sebagai unsur peningkatan dan penjaga stabilitas keamanan nasional. Kasus konflik reklamasi memberikan banyak hal mengenai polemik reklamasi yang membuat masyarakat kebingungan untuk menentukan potensi ancaman atas dilakukannya reklamasi itu sendiri.

Kembali pada tabel 4.1, persepsi ancaman yang lebih krusial yang diutarakan instansi pemerintah dan media sendiri justru tidak menjadi fokus utama pada pemberitaan. Melainkan media terlalu fokus memberitakan reklamasi dan memiliki posisi masing-masing seperti yang terlihat dalam *tone* pemberitaan yang sebelumnya telah dijelaskan.

Padahal menurut Kesbangpol dengan Bapak Habib Setiawan sebagai narasumber menyatakan bahwa ancaman dari reklamasi yang sesungguhnya justru tidak terlalu disorot oleh media, seperti ancaman akan adanya daerah eksklusif yakni pulau-pulau reklamasi karena memang ketidakmampuan negara untuk memenuhi hak masyarakatnya untuk melaut di Teluk Jakarta. Hal tersebut dikarenakan mendekati sedikit ke pulau reklamasi atau melewati garis tertentu di Teluk Jakarta maka pergerakan nelayan ataupun wisatawan akan dihentikan oleh keamanan swasta penjaga pulau reklamasi.<sup>75</sup> Begitupula dengan polemik yang terjadi di masyarakat maupun ketidaksinergisan pemerintah dalam memutuskan masa depan reklamasi di tahun 2017 membuat meningkatnya potensi konflik di DKI Jakarta. Media massa, utamanya media daring justru merupakan unsur yang ikut serta menambah peliknya polemik yang menyebabkan keterpecahan antara masyarakat dan pemerintah dengan memberitakan pemberitaan yang tidak sesuai fakta ataupun dengan mengeluarkan berita sensasional.

Begitupula menurut Bapak Agus Sudiby dari PWI yang merumuskan masih banyak *hoax* tersebar di Indonesia, termasuk pemberitaan mengenai reklamasi yang terkadang tidak memakai kebenaran fakta lingkungan seperti yang Kesbangpol DKI Jakarta dan KLHK utarakan dalam wawancara dengan peneliti. Dalam reklamasi, fakta

---

<sup>75</sup> Pernyataan narasumber Habib Setiawan mewakili Kesbangpol DKI Jakarta dan diperkuat dengan pemberitaan *Republika Online* pada 26 Oktober 2017 yang berjudul Ketua Komisi IV DPR Tetap Dukung Moratorium Reklamasi, dapat diakses melalui <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/10/26/oye2j4414-ketua-komisi-iv-dpr-tetap-dukung-moratorium-reklamasi> serta tayangan Fakta tvOne pada 17 Oktober 2017

lingkungan seringkali merupakan sebuah *hoax* dan masing-masing media memiliki fakta yang ingin diberitakannya sendiri. Hal tersebut juga menimbulkan ancaman informasi.

Ancaman informasi selain diutarakan oleh PWI, juga diutarakan oleh Dinkominfohumas DKI Jakarta bahwa informasi di Indonesia sangat rentan. Kemudian *Republika Online* juga menyatakan bahwa informasi juga menjadi ancaman ketika informasi dapat memecah belah bangsa.

Menurut KLHK, banyak persepsi ancaman yang seharusnya juga masuk dalam ranah pemberitaan. Disamping reklamasi sebagai isu terbesar, perlu pula disampaikan bahwa perairan Indonesia setiap tahunnya mengalami pencemaran air laut dengan adanya tumpahan minyak di sekitar Riau. Dengan fokus yang terlalu besar terhadap reklamasi dan segala fakta lingkungan yang dipegang masing-masing media dengan kebenaran tanpa verifikasi, maka dimungkinkan kedepannya kejahatan lingkungan bisa meningkat akibat tidak di-*viral*-kan, termasuk reklamasi sebagai isu utama yang padahal berdampak justru bukan hanya di DKI Jakarta, melainkan di daerah-daerah lain yang terkena imbas, sebagai contoh di bulan Oktober 2017, *ANTARA News* dan *Republika* sama-sama mengeluarkan berita tentang masyarakat Sampit yang terdampak dikarenakan pengerukan pasir reklamasi. Hal tersebut belum dikatakan ter-*cover* secara baik mengingat banyak area selain Sampit yang juga mengalami pengerukan untuk reklamasi.

Media, terutama media daring yang mampu memberikan *trending topics* bagi pemberitaan secara masif seharusnya mampu memetakan ancaman dengan berbagai fakta yang sesungguhnya. Fakta yang tidak hanya didapatkan, namun fakta dan data yang terverifikasi dari kajian akademisi yang kredibel maupun kajian instansi. Sehingga media secara internal juga mampu untuk mengkonstruksi ancaman kepada pembacanya seperti yang Buzan dan Waeber katakan yakni *socially constructed*.

Sifat ancaman yang dapat dibangun dari persepsi sosial tersebut membuat media dengan mudah dapat membantu meningkatkan aspek stabilitas keamanan nasional. Ketika pemetaan ancaman dilakukan oleh media, maka media juga harus memberikan solusi-solusi untuk mengatasi ancaman ataupun potensi ancaman tersebut dengan melakukan *sharing sharing* informasi dengan stakeholder pemerintah terkait.

Semisal dalam kasus reklamasi beberapa ancaman yang dikemukakan media *ANTARA News* dan *Republika Online* melalui pemberitaan antara lain adalah ancaman lingkungan yang tidak ter-cover secara sempurna, kemudian kedua media daring juga memetakan adanya ancaman korupsi yang telah dibuktikan oleh KPK bahwa dalam reklamasi terdapat adanya tindak pidana korupsi yang menjerat beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dan pengembang, selain itu media juga dengan baik telah memberitakan adanya gesekan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan yang krusial. Walau masih banyak lagi ancaman dan potensi ancaman seperti terpecahnya masyarakat akibat polemik yang dibumbui politisasi isu.

*ANTARA News* dengan *agenda settingnya* yakni 3E+1N dan selaku media milik pemerintah seharusnya lebih jauh lagi mengkaji aspek keamanan nasional, mengingat keamanan nasional saat ini bisa muncul dari berbagai dimensi, bahkan hampir setiap lembaga memiliki definisi ancamannya sendiri, sehingga perlu ada tindakan lebih untuk memasukkan keamanan nasional melalui *agenda setting*, agar pembaca memiliki gambaran atas ancaman nyata apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Sementara *Republika Online* walau mengatakan informasi merupakan ancaman utama, namun ancaman-ancaman dalam pemberitaannya lebih bersifat manusia (*anthropocentric*) seperti sosial dan ekonomi, justru tentang lingkungan masih sangat minim dan belum ditonjolkan, padahal ancaman terhadap lingkungan merupakan hal penting yang harus disorot dengan adanya reklamasi.

Kesimpulannya adalah media massa utamanya dalam penelitian ini adalah media daring seharusnya mampu membantu pemerintah untuk mengkonstruksikan ancaman yang lebih nyata ada di lapangan yang mayoritas adalah ancaman non militer seperti ancaman informasi, ancaman lingkungan, ancaman sosial yang dapat memecah belah bangsa dan juga ancaman birokrasi seperti yang terlihat di kasus reklamasi Teluk Jakarta tahun 2017. Selain itu, media massa harus mampu menjadi *watchdog* guna membangun keholistikan persepsi, yakni tidak hanya membantu pemerintah terkait mempersepsikan ancaman, namun juga menjadi pengawas atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi ataupun mencegah ancaman. Hal tersebut harus dimasukkan kedalam *agenda setting* setiap media strategis di Indonesia agar *editorial policy* yang akan dibentuk dikemudian hari dapat memberikan arahan untuk melindungi keamanan nasional melalui pemberitaan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

#### **4.2.2.2 Dialektika Hegel dalam Pemberitaan Konflik Reklamasi Teluk Jakarta dari ANTARA News dan Republika Online**

Sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Marx bahwa Hegel memang hanya merumuskan pemikiran dan pemikiran tersebut seharusnya dituang kedalam kenyataan yakni beralih dari teori menjadi praktis.<sup>76</sup> Begitupula dalam membahas keterkaitan pemberitaan reklamasi dengan keamanan nasional. Diawali dari pernyataan narasumber kemudian dapat menjadi referensi atas rumusan kebijakan yang tepat seperti dalam contoh kasus pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta di bulan Oktober 2017.

Narasumber pendukung reklamasi memiliki argumennya dan fakta data pendukungnya yang menyatakan 'Reklamasi itu Positif', sebaliknya narasumber yang menolak reklamasi memiliki argumen yang kontra terhadap reklamasi juga dengan fakta dan data pendukungnya

<sup>76</sup> Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 48

menyatakan 'Reklamasi itu Negatif'.<sup>77</sup> Argumen pertama yakni 'Reklamasi itu Positif' yang didasari dari awal tercetusnya ide reklamasi merupakan sebuah tesis. Sementara argumen 'Reklamasi itu Negatif' merupakan bentuk antitesis terhadap tesis awal yakni 'Reklamasi itu Positif'. Argumen-argumen tersebut tidak hanya sebatas argumen, melainkan terbentuk karena masing-masing narasumber dalam pemberitaan memiliki kajian masing-masing dan fokus masing-masing dalam memandang reklamasi Teluk Jakarta.

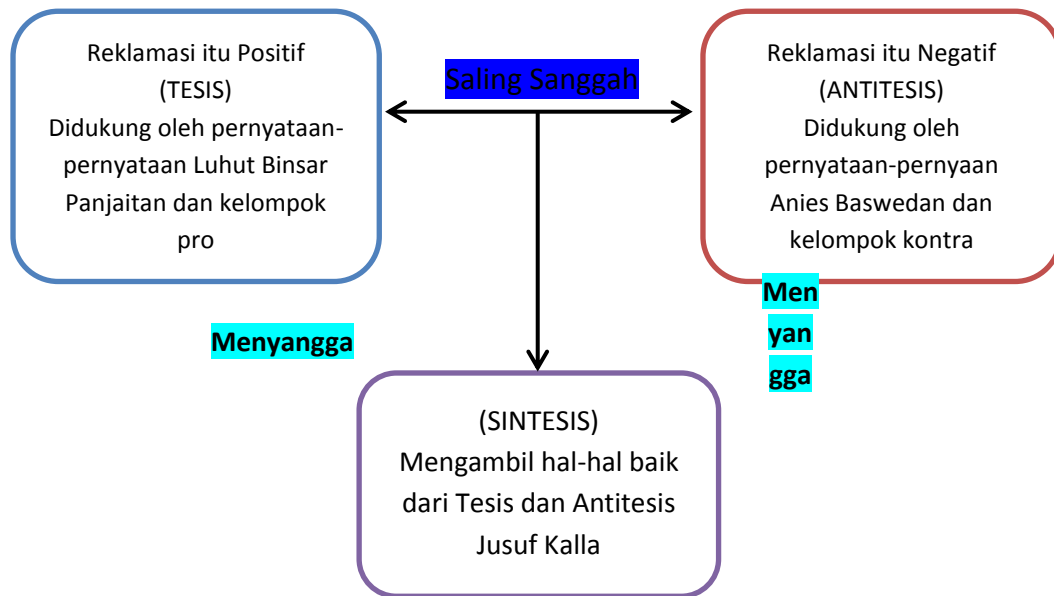
Tesis dan antitesis yang saling menyanggah tersebut menjadi polemik selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya di setiap media massa termasuk media daring berskala nasional utamanya pada tahun 2017. Di Provinsi DKI Jakarta, bahkan ber-resonansi secara nasional, hubungan dari tesis dan antitesis tersebut dibumbui dengan momentum politik, maka perdebatan akan semakin tinggi. Tesis dan antitesis mengenai gagasan reklamasi tersebut sebenarnya telah menemukan titik terang pada bulan Oktober 2017. Hal tersebut dikarenakan ada narasumber yang merumuskan suatu gagasan sebagai sintesis dari proses saling sanggah tesis dan antitesis reklamasi. Pada Gambar 4.1 sebelumnya terlihat bahwa terdapat narasumber-narasumber dengan posisi strategis, yakni Kemenkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Apabila pernyataan narasumber strategis<sup>78</sup> diolah melalui bagan dialektika sesuai pemikiran Hegel maka akan terbentuk bagan seperti berikut:

---

<sup>77</sup> Dapat dilihat dalam Lampiran, untuk *ANTARA News* 1-A, dst dan untuk *Republika Online* 1-B, dst.

<sup>78</sup> Berdasarkan subbab sebelumnya yang memuat Tabel 4.2, 4.3 dan 4.4 pada hlm. 59-62



**Bagan 4.12 Dialektika Hegel dalam Pemberitaan Reklamasi**

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa gagasan yang bersifat sintesis menyangga tesis dan antitesis. Kelompok pendukung tesis menginginkan reklamasi dibangun dan diselesaikan. Sementara kelompok pendukung antitesis menginginkan reklamasi tidak dilakukan. Namun berdasar pemberitaan maka jelas terlihat bahwa beberapa pulau sudah dibangun yakni Pulau C, Pulau D, Pulau G dan Pulau N. Terdapat 4 (empat) dari 17 (tujuh belas) pulau sudah dibangun, sementara pulau lainnya belum ada secara fisik.

Pernyataan Jusuf Kalla<sup>79</sup> menjadi sintesis atas tesis yang dikemukakan Luhut Binsar Panjaitan dan antitesis yang dikemukakan Anies Baswedan. Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah tidak melanjutkan pembangunan reklamasi, namun pulau-pulau yang sudah ada (yakni Pulau C, D, G, dan N) tidak mungkin dibongkar karena biaya pembongkarannya memakan *cost* yang cukup tinggi sehingga lebih baik dipergunakan untuk masyarakat dan pemerintah agar pulau tersebut berfungsi dan terpelihara.

<sup>79</sup> Pada Tabel 4.4, hlm. 61

Pernyataan Jusuf Kalla telah ada dan dimuat sejak 31 Oktober 2017. Namun kebijakan yang serupa dengan usulan Jusuf Kalla baru diimplementasikan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pada 26 September 2018<sup>80</sup> yakni lebih dari 10 bulan dari keluarnya pernyataan Jusuf Kalla tersebut. Kendala teknis dan hubungan birokrasi dimungkinkan menjadi terulurnya waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikan sintesis yang ada di tahun 2017.

Pemikiran Hegel tidak hanya sebatas menjadi sintesis kemudian selesai. Melainkan sintesis akan menjadi sebuah tesis baru yang mana akan ada antitesis atasnya setelah itu. Namun penelitian ini berhenti pada penemuan sintesis oleh Jusuf Kalla pada tahun 2017 yang kemudian diimplementasikan pada tahun 2018.

Media telah mampu memberikan ruang pada argumen-argumen pihak yang berselisih walau belum komprehensif, namun media juga memuat ruang bagi argumen-argumen yang bersifat konstruktif walau belum ada bagian dalam media untuk mengkaji isu melalui pembangunan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah, padahal media berperan pada penentuan kebijakan pemerintah melalui rapat pimpinannya.

---

<sup>80</sup> Diolah dari berbagai sumber media yang terbit pada tanggal 26 -27 September 2018.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Agenda Setting ANTARA News* dalam memberitakan konflik reklamasi Teluk Jakarta yang harus menyertakan pemberitaan bersifat 3E+1 dalam *editorial policy*-nya dapat dikatakan tepat dalam memberitakan suatu konflik, namun diperlukan adanya sorotan-sorotan yang lebih mendalam terhadap unsur-unsur yang krusial terhadap stabilitas keamanan nasional seperti pemberitaan informasi yang berimbang dengan tidak hanya mengatur kuantitas, tetapi juga menyertakan seluruh komponen dalam konflik. Sementara *agenda setting Republika Online* masih menunjukkan sikap menolak reklamasi dengan pemberitaan yang tidak berimbang. Hal tersebut mampu memberikan gambaran pada pembacanya untuk bersikap menolak reklamasi dan mendukung serta mengawal janji kampanye gubernur terpilih yang menolak reklamasi, sehingga membuat *agenda setting Republika Online* masih perlu dikaji lebih lanjut agar dapat memasukkan unsur-unsur yang meningkatkan keamanan nasional pada pemberitaan. Hal-hal yang menyebabkan kurang menyeluruhnya informasi yang diberitakan media antara lain adanya kendala-kendala wartawan di lapangan dikarenakan informasi mengenai suatu konflik memang bersifat sensitif dan sering kali ada pihak-pihak yang tidak terbuka dalam memberikan informasi pada media.
- 2) Media daring telah memberikan ruang pada argumen-argumen yang dapat menengahi polemik yang terjadi atau memberikan sintesis bagi dua unsur yang saling sanggah dalam konflik reklamasi Teluk Jakarta. Hal tersebut mampu dikembangkan oleh media yakni

dengan menyorot argumen-argumen yang konstruktif baik dari pihak yang mendukung atau menolak reklamasi dan dapat digunakan dalam kasus pemberitaan konflik lainnya. Selain itu pemberitaan masih perlu memperhatikan dan mempertimbangkan untuk melakukan sekuritisasi mengenai apa yang sedang dihadapi bangsa ini dengan melakukan sorotan terhadap unsur-unsur yang mengganggu stabilitas keamanan nasional yang belum begitu terlihat jelas dari pemberitaan kedua media daring dalam reklamasi Teluk Jakarta pada Oktober 2017.

## **5.2 Rekomendasi**

Penelitian mengenai *Agenda Setting* media daring dapat memberikan rekomendasi yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

### **5.2.1 Rekomendasi Teoritis**

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep dan teori *Agenda Setting* dengan memasukkan unsur yang belum banyak dibahas dalam media yakni Konsep Keamanan Nasional. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yakni tidak memasukkan unsur kepemilikan modal dikarenakan waktu penelitian yang tidak memadai untuk mencari informasi secara menyeluruh mengenai kepemilikan modal dan pengaruhnya terhadap *agenda setting* kedua media tersebut.
- 2) Sinergitas pemikiran antara pemerintah, media dan juga akademisi diperlukan dalam meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Salah satunya unsur yang mampu mempromosikannya adalah Universitas Pertahanan. Sebagai satu-satunya universitas yang fokus terhadap studi pertahanan perlu terus mempromosikan teori dan konsep Keamanan Nasional pada ruang-ruang publik, salah satunya

contohnya adalah ranah media sebagai sektor krusial dalam penyebaran informasi bagi masyarakat Indonesia.

### 5.2.2 Rekomendasi Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan evaluasi terhadap *Agenda Setting* media daring *ANTARA News* dan *Republika Online* dalam menghadirkan pemberitaan yang mendukung peningkatan keamanan nasional dengan mempertimbangkan berita dengan mengedepankan unsur *peace journalism* dan *ecocentrism* serta membantu pemerintah mempromosikan keamanan nasional melalui sorotan berita terhadap isu-isu yang dianggap mengancam keamanan nasional.
- 2) Media diharapkan membantu pemerintah menyorot isu yang mengganggu kestabilan keamanan nasional, seperti penyebaran *hoax*, isu lingkungan, serta keamanan informasi. Tetap menjadi *watchdog* dalam kebijakan pemerintah serta kehidupan bermasyarakat. Namun akan lebih baik jika media daring membantu pemerintah dalam merumuskan potensi ancaman dan ancaman nyata serta menjadikan masyarakat sadar akan potensi ancaman. Hal tersebut akan meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Ancaman yang telah dipetakan antara lain hanyalah ancaman lingkungan yang masih simpang siur dan ancaman tindak pidana korupsi. Padahal banyak persepsi ancaman yang dapat dipetakan oleh media melalui reklamasi Teluk Jakarta, seperti Daerah Eksklusif, keterpecahan masyarakat karena *hoax* serta keterpecahan birokrasi karena kepentingan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bartoli, Andrea, dkk. 2011. *Mental Models in the Visualization of Conflict Escalation and Entrapment: Biases and Alternatives* (24th Annual International Association of Conflict Management Conference, Istanbul: Turkey).
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Second Edition, (University of Nebraska, Lincoln : SAGE Publications, 2003)
- Dearing, James W. dan Rogers, Everett M. 1996. *Communication Concepts 6: Agenda-Setting*. California: Sage Publications, Inc
- Dyer, Hugh. 2018. *Introducing Green Theory in International Relations*, diakses melalui <http://www.e-ir.info/2018/01/07/green-theory-in-international-relations/>
- Eckersley, Robyn. 1992. *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*. New York: UCL Press
- Fitriani, dkk (CSIS), 2019, *Towards a Resilient Regional Cyber Space Security: Perspective and Challenges in South East Asia*, Yogyakarta: Kanisius
- Griffin, E.M. 2012. *A First Look at Communication Theory*. New York: McGraw-Hill
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI
- Koalisi Pakar Interdisiplin. 2017. *Selamatkan Teluk Jakarta*. Jakarta: Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta
- Kortenkamp, Katherine V. dan Moore, Colleen F. 2001. *Journal of Environmental Psychology: Ecocentrism and Anthropocentrism: Moral Reasoning about Ecological Commons Dilemmas*. Madison: University of Wisconsin
- Lim, Merlyna. 2012. *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Arizona: Participatory Media Lab (Univesrity of Arizona)

- Limnatis, Nectarios G. 2010. *The Dimensions of Hegel Dialectic*. London: Continuum International Publishing Group
- Lippmann, Walter. 1998. *Public Opinion* (Cetakan Kedua). New Jersey: The Macmillan Company
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (terjemahan). Jakarta: UI-Press
- Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael dan J, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State University
- Nugroho, Dr. Riant. 2014. *National Security Policy: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ramsbotham, Oliver, dkk. 2015. *Contemporary Conflict Resolution*. New Jersey: Wiley Publishing
- Sageman, Marc. 2008. *Leaderless Jihad*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta
- Wahyuni, S. 2012. *Qualitative Research Method*. Jakarta: Salemba Empat
- Webel, C., & Galtung, J. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.
- Williams, Paul D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge

**Jurnal :**

- Budhirianto, Syarif, dkk. 2018. *Analisis Wacana Media terhadap Kebijakan dan Citra Pemerintah di Surat Kabar Daerah pada Tahun 2017*. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan) Vol. 19 No. 2 Desember 2018.

Artini, Dr. 2017. *Bisnis Media dan Jurnalisme di Persimpangan: Keberpihakan Jurnalisme Media Internet*. Jurnal Dewan Pers Edisi 15 Tahun 2017.

Edelman, 2017, *Edelman Trust Barometer: 2017 Executive Summary*

Fong, Nicole Yang Lai. 2009. *Framing Analysis of a Conflict: War/Peace Journalism*. The Journal of the South East Asia Research Centre for Communications and Humanities, Vol.1 No. 1 ISSN 1985-9414

Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2017. Majalah Info Singkat: *Reklamasi Teluk Jakarta, Perluah Dilanjutkan?*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, diakses melalui [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-20-II-P3DI-Oktober-2017-189.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-20-II-P3DI-Oktober-2017-189.pdf)

Schrage, Jan-Felix. 2016. *Social Media, Mass Media and the 'Public Sphere': Differentiation, Complementarity and Co-existenc*. Stuttgart: University of Stuttgart

#### **Website:**

Pemberitaan *ANTARA News*, diakses melalui <https://antaranews.com>

Pemberitaan *Republika Online*, diakses melalui <http://republika.co.id>

Profil BUMN Indonesia Edisi 2017, diakses melalui [http://bumn.go.id/upload/download\\_img/file\\_download/5a604e0322b3a\\_20180118023427/15/#zoom=z](http://bumn.go.id/upload/download_img/file_download/5a604e0322b3a_20180118023427/15/#zoom=z)

Biro Informasi dan Hukum Kemenkomaritim Republik Indonesia, 2016, *Rizal Ramli pastikan Moratorium Reklamasi*, melalui <https://maritim.go.id/rizal-ramli-pastikan-moratorium-proyek-reklamasi/>

Prabowo, Dani. 2017. *Ahli Kelautan: Reklamasi Bukan Solusi Banjir Jakarta*, diakses melalui <https://properti.kompas.com/read/2017/11/02/162605421/ahli-kelautan-reklamasi-bukan-solusi-banjir-jakarta>